

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PT. BPR AMBULU
DHANAARTHA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Rizna Ramadhani Winanda
NIM : E20161029

Dosen Pembimbing :

Dr. Nurul Widyawati IR,S.Sos.,M.Si
NIP. 19750905 200501 2 003

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JULI 2020**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*
BANK PERKREDITAN RAKYAT DI PT. BPR AMBULU
DHANAARTHA KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

RIZNA RAMADHANI WINANDA
NIM : E20161029

Disetujui Pembimbing



Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos., M.Si
NIP. 19750905 200501 2 003

IAIN JEMBER

MOTTO

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.



PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, papi saya Drs.H.Djoko Wijono dan mami saya Naniek Sutarni yang sudah memberi doa, semangat, dan dukungan dalam hal apapun. Serta untuk orang tua kedua bagi saya di Jember, Budhe saya Ibu Retno Wahjuti dan Tante saya Ibu Sri Mulyani yang memberikan doa, semangat, dan dukungan hingga bisa menempuh pendidikan ini.
2. Papa Nanang Andy Asyim dan Mama Ambar Astutik yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan untuk saya dalam hal apapun.
3. Kedua adik saya tercinta, Dewi Fariznadi Winanda dan Giyanti Puspita Dewi yang telah menjadi alasan terkuat saya untuk menjadi lebih baik.
4. Kelas Perbankan Syariah 1, terimakasih atas kekeluargaannya selama ini. Keluarga besar seperjuangan angkatan 2016 Perbankan Syariah serta sahabat – sahabat para pejuang toga khususnya Nurfiatul M, Mayu Bariroh, Firda F, Wilda, Faulia, Dina R, Liyun, Anggraini S dan Rosikotul yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan selama ini.
5. Teman – teman kamar mahad BR.102 yang sudah menjadi sahabat saya dari awal menjadi mahasiswa hingga sekarang Eliana, Nurul Latifa, Amelia dan Astika.
6. Serta Almamater Institut Agama Islam Negeri Jember dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penyusun diberikan kekuatan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW , beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu istiqomah di jalannya hingga akhir nanti.

Skripsi dengan judul Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember.

Tentunya penyusun menyadari bahwa berkat pertolongan Allah SWT dan bantuan dari berbagai pihak yang penyusun tidak dapat sebutkan satu – persatu dalam kesempatan ini, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu dengan ketulusan dan penuh rasa syukur dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Babun Suharto, SE,M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa'i, SE,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember.

3. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember.
4. Ibu Dr. Nurul Widyawati IR, S.Sos,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dalam sela – sela kesibukannya menjalankan aktivitas, tetap sabar dan ikhlas dalam memberi bimbingan, arahan, motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE,.M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan bimbingan dan nasehat dalam kegiatan akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam pelayanannya.
7. Kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulis skripsi ini. Semoga amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Jember, 17 Mei 2020

Rizna Ramadhani Winanda

ABSTRAK

Rizna Ramadhani Winanda, Dr. Nurul Widyawati IR,M.Si. 2020:
Implementasi Good Corporate Governance Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember

Pada dasarnya *Good Corporate Governance* (GCG) sangatlah penting untuk mengatur suatu organisasi terutama untuk lembaga keuangan, GCG memiliki lima prinsip yang harus diterapkan yakni, prinsip transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Fakta atau aplikasinya memang sudah menerapkan kelima prinsip GCG tersebut dengan baik, tetapi ada beberapa prinsip yang penerapan kelima prinsip *Good Corporate Governance* nya di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember belum maksimal.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember? ; 2) Apa saja yang menjadi kendala penerapan *Good Corporate Governance* yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?

Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan : 1) Untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember. ; 2) Untuk mendiskripsikan apa saja yang menjadi kendala penerapan *Good Corporate Governance* di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Hal ini untuk mengetahui bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan : 1) Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember yang dilaksanakan dari awal terbentuknya peraturan Peraturan OJK No 4/POJK.03/2015 tentang penetapan tata kelola yang baik (GCG) hingga sekarang. Dalam pelaksanaannya tersebut sudah terlaksana dengan baik di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember. ; 2) Kendala dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember yaitu adanya pengambilan keputusan antara kantor pusat yang ada di Kota Malang dengan yang berada di Kota Jember yang tidak sinkron atau tidak sama, karena perbedaan tempat dan kasus yang terjadi. Dan adanya kebenturan kepentingan antara orang dalam dengan satunya dalam menangani *vendor holding* mengenai sistem IT. Serta adanya ketidak terbuka atau keterlibatan secara langsung antara audit dalam kasus kredit macet yang hanya di selesaikan oleh *Account Officer* (AO) dan Tim Kredit Bermasalah (TKB).

Kata kunci : Implementasi. *Good Corporate Governance*

ABSTRACT

Rizna Ramadhani Winanda, Dr. Nurul Widyawati IR,M.Si. 2020: *Good Corporate Governance Implementation of Rural Bank (BPR) , PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember*

Good Corporate Governance (GCG) is very needed to regulate an organization, especially for financial institutions. GCG has five principles that must be applied: the principle of *transparency, accountability, responsibility, independency, and fairness* in conducting its business activities. The five principles of CGC have been applied well. However, some principles have not applied the five *Good Corporate Governance* principles in PT. BPR Ambulu Dhanaratha, Jember district optimally yet.

This study focuses on 1) Rural Bank (BPR) *Good Corporate Governance* in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district; 2) What does obstruct *Good Corporate Governance implementation* in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district?

This study aims to describe 1) Rural Bank (BPR) *Good Corporate Governance* implementation in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district; 2) The factors that obstruct *Good Corporate Governance* implementation in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district.

This study used a qualitative approach. The type of the research was *field research*. This method aimed to identify *Good Corporate Governance* implementation in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district. The researcher used observation, interview, and documentation techniques in collecting data.

The conclusions of this study are 1) *Good Corporate Governance* (GCG) implementation in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district has been running since the beginning of formation of OJK Regulation No. 4/POJK.03/2015 on good governance (GCG) stipulation until now. CGC implementation in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district is running well; 2) The obstacles in *Good Corporate Governance* (GCG) implementation in PT. BPR Ambulu Dhanaartha Jember district is the decision making between head office in Malang and Jember that are not synchronized due to place and case differences. Besides, conflict of interests among people in handling a *vendor holding* of IT system also obstructs CGC implementation. Further, lack of transparency or direct involvement among auditors in case of bad credit which is only resolved by *Account Officer* (AO) and Troubled Credit Team (TKB).

Keywords: implementation, *Good Corporate Governance*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	27
1. Pengertian Implementasi.....	27
2. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i>	28
3. Struktur <i>Good Corporate Governance</i>	31
4. Standart GCG pada Perbankan	33

5. Manfaat penerapan GCG.....	34
6. Tujuan Penerapan GCG	34
7. Prinsip – prinsip GCG.....	36
8. Penerapan GCG pada Perbankan	38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek Penelitian.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	50
E. Analisis Data	51
F. Keabsahan Data.....	52
G. Tahap-tahap Penelitian.....	53

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Obyek Penelitian	55
B. Penyajian Data dan Analisis.....	62
C. Pembahasan Temuan.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran-saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
3. Denah/Peta Desa
4. Surat Permohonan Izin Penelitian

5. Surat Keterangan Selesai Penelitian
6. Jurnal Kegiatan Penelitian
7. Pedoman Penelitian
8. Dokumentasi
9. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG atau *Good Corporate Governance*) bagi Bank Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa Bank Umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dalam kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi rencana strategi, pelaksanaan kebijakan, serta langkah – langkah penawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.¹

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountibility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).²

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 Tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka Bank Perkreditan Rakyat juga diwajibkan untuk menetapkan tata kelola yang baik (GCG), yang mencakup prinsip transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accounbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya sehubung dengan kewajiban tersebut, maka Bank Perkreditan Rakyat

¹ Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 *tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum*, 4 (13 November 2019, jam 10.18)

² Ibid, 4

diwajibkan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip – prinsip GCG.³

Penerapan prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah instansi, termasuk Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini lebih ditujukan kepada adanya tanggung jawab publik (*public accountability*) berkaitan dengan kegiatan operasional bank yang diharapkan benar – benar mematuhi ketentuan – ketentuan yang telah digariskan dalam hukum positif seperti Undang – Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang – Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.⁴

Dengan demikian, penerapan prinsip – prinsip GCG sangat penting (*urgen*) untuk diterapkan dalam operasional perusahaan. Lebih – lebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan karena dalam operasional bank, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa keuangan kepada masyarakat. Hal ini sangat mungkin mengingat bank adalah institusi yang telah diatur sedemikian kompleksnya.

Dalam prakteknya, keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* tidaklah semudah memahami batasan atau konsepnya. Sebaik – baik prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* dan peraturan bukanlah jaminan tidak akan timbul penyimpangan kalau tanpa adanya integritas termasuk moralitas para pelakunya. Tidak jarang terjadi fenomena kesalahpahaman, kurang-taatan atasan, dan konflik peran dan fungsi

³ Peraturan OJK, No.4/POJK.03/2015 tentang tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (22 Oktober 2019, jam 05.55)

⁴ Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

pengambilan keputusan diantara para pengelola perusahaan dan bahkan memanipulasi keuangan oleh pihak direksi dan manajer. Kalau sudah seperti itu keberhasilan *Good Corporate Governance* sangat bergantung pada integritas dari para pengelola perusahaan bersangkutan.⁵

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak..⁶

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan sendirinya Bank Perkreditan Rakyat tidak ikut memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.⁸

Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No. 38 yang menjadi momentum awal pendirian BPR – BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “ Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR.⁹ Landasan Hukum BPR adalah UU No.7/1992 tentang perbankan

⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga,2010) 80-81.

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 24

⁷ Rachmadi Usma,S.H, *aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 63

⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 33

⁹ Rachmadi Usma,S.H, *aspek-aspek hukum perbankan di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001), 38

sebagaimana telah diubah dengan UU No.10/1998. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan bahwa BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha BPR terutama ditujukan untuk melayani usaha – usaha kecil dan masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa Perseroan Terbatas (PT).¹⁰

Status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/ atau lembaga – lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 dengan memenuhi prasyarat tatacara yang ditetapkan karena mengingat bahwa lembaga – lembaga tersebut telah berkembang dari lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga tersebut harus diakui. Oleh karena itu, UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992 memberikan kejelasan status lembaga – lembaga dimaksud. Untuk menjamin kestuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tatacara pemberian status lembaga – lembaga dimaksud ditetapkan dengan peraturan pemerintah.¹¹

Meskipun sama – sama bergerak di sektor perbankan, Bank Perkreditan Rakyat memiliki perbedaan yang khas dari Bank Konvensional, salah satunya

¹⁰ Ibid, 38

¹¹ Undang – undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992

adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip perbankan yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, selanjutnya dari kedua jenis tersebut bisa ditinjau dari bentuk simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat. Jika bank umum menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, namun bank BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito. Dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa BPR tidak dapat melakukan transaksi giral, namun bank umum dapat melakukan transaksi giral.¹²

Data terbaru OJK di Jember lalu di lanjutkan ke OJK pusat perbulan Juni 2019, BPR Ambulu Dhanaarta menjadi salah satu BPR yang berdiri di Kabupaten Jember dari 19 BPR yang berdiri di Kabupaten Jember.¹³ BPR Ambulu Dhanaarta ini berdiri tepatnya pada tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Notaris Bernard Lamak, SH yang berkedudukan di Jember dan telah diperbaiki dengan Akta tertanggal 15 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH, yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-4609.HT.01.01-TH.89 tertanggal 23 Mei 1989. Ijin usaha oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-077/KM.13/1989, Tanggal 14 Juli 1989 dengan modal awal pada saat itu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengalami beberapa perubahan hingga saat ini sudah menjadi Rp

¹² Undang – undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992

¹³ Data OJK *tentang daftar anggota BPR di Jember perJuni 2019*(dilihat 1 november 2019 jam 17.08)

22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) berikut perubahan-perubahan yang telah terjadi yaitu :

1. Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 09 tanggal 11 Juli 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU PT. No 40 Tahun 2007.
2. Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 01 tanggal 06 Januari 2011 tentang Perubahan Kepemilikan Pemegang Saham.
3. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 416 tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor.
4. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 451 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Direksi.
5. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 02 tanggal 02 September 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Komisaris.
6. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 16 tanggal 22 Juni 2015 tentang Perubahan Modal Penambahan Modal Disetor.
7. Akta Shella Norma Yunita Almega, SH., M., Kn. Akta No. 29 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Pengurus Dewan Direksi.¹⁴

Tanggal mulai operasional perdana yaitu pada tanggal, 25 November 1989 dan berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Raya Suyitman No. 59 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.¹⁵

Alasan peneliti mengadakan penelitian di BPR Ambulu Dhanaarta karena BPR Ambuli Dhanaarta merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat

¹⁴ Website BPR Ambulu Dhanaartha, (1 november 2019, jam 19.00)

¹⁵ Website BPR Ambulu Dhanaartha,(1 november 2019, jam 19.00)

yang sudah berdiri selama 30 tahun, memiliki 1 kantor cabang dan 2 kantor kas. Selain itu pada 2nd infobank BPR AWARDS 2011, BPR Ambulu Dhanaarta Jember mendapat predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2010, dan BPR Ambulu Dhanaarta Jember mendapatkan penghargaan BPR berkinerja Terbaik Se-Wilayah kerja kantor Bank Indonesia Jember tahun 2008 untuk kategori Bank Perkreditan Rakyat, juga PT. BPR Ambulu Dhanaarta Jember mendapatkan peringkat pertama kategori Bank Perkreditan Rakyat dalam penghargaan Perbankan berkinerja Terbaik Se-Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember tahun 2009.¹⁶

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di BPR Ambulu Dhanaarta dan peneliti juga bermaksud mengkaji lebih dalam tentang bagaimana Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut kedalam penelitian yang berjudul “**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* BANK PERKREDITAN RAKYAT, DI PT BPR AMBULU DHANAARTA KAB. JEMBER**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan di analisis, di antaranya :

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember?

¹⁶ Website BPR Ambulu Dhanaarta,(1 november 2019, jam 19.00)

2. Apa saja kendala penerapan *Good Corporate Governance* yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
2. Untuk mendeskripsikan apa saja yang menjadi kendala dalam menerapkan *Good Corporate Governance* di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa keselarasan antara teori dan praktek di lapangan terkait dengan tata kelola bank perkreditan rakyat.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembangunan wawasan keilmuan bagi perkembangan perbankan secara luas dan secara khusus dalam bidang tata kelola bank perkreditan rakyat terhadap lembaga keuangan perbankan di Indonesia pada umumnya pada khususnya di Kabupaten Jember.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat di jadikan referensi atau bahan rujukan bagi penelitian – penelitian sejenis pada masa yang akan datang serta menambah khasanah keilmuan, kepustakaan dalam bidang tata kelola terhadap lembaga keuangan perbankan di Indonesia.
- d. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur atau barometer terhadap *good corporate governance* lembaga keuangan perbankan di Indonesia khususnya di Bank Perkreditan Rakyat di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
- e. Diharapkan hasil penelitian ini bisa mengetahui apakah implementasi *good corporate governance* bank perkreditan rakyat di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember sudah sesuai dengan prosedur dan teori.

2. Secara praktis

- a. Bagi peneliti, di harapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dalam bidang *good corporate governance* terhadap lembaga keuangan perbankan di Indonesia dan menjadi motivasi untuk menjadi ahli dalam bidang tersebut.
- b. Bagi Institusi Perguruan Tinggi IAIN Jember diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khansanah keilmuan, khususnya dalam bidang perbankan.
- c. Bagi masyarakat diharapkan hasil penelitian ini memberikan pengetahuan dan informasi terkait *good corporate governance* terhadap lembaga keuangan perbankan di Indonesia.

- d. Bagi instansi terkait hasil penelitian ini bisa memberikan sumbangsih ide dan terobosan baru untuk kemajuan instansi terkait.

E. Definisi Istilah

Untuk memudahkan pemahaman pembaca tentang judul yang peneliti tulis, diperlukan pengertian istilah – istilah, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana yang dimaksud peneliti.

1. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan.¹⁷ Sedangkan secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia, Implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”¹⁸
2. Tata kelola (*Good Corporate Governance*), menurut POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pengertian tata kelola adalah tata kelola BPR yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan

¹⁷ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 427

¹⁸ Arinda Firdianti, M.Pdi, “*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*”, ebook, ed. Elin Wiji Astuti, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing), 19.

mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* ini juga mengandung pengertian mengenai pengaturan atas pembagian tugas dan tanggungjawab diantara pihak atau para “*key players*” yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda – beda dalam perusahaan. Para pihak yang berkepentingan atas pengarahannya dan pengendalian perusahaan itu meliputi: dewan direksi, para manager, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya.¹⁹ Oleh karena itu, tata kelola (*Corporate Governance*) juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, atau *board of executive director, stakeholders*, dan pemegang saham suatu perusahaan.²⁰

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan rangkuman sementara dari sisi proposal, yakni suatu gambaran tentang isi proposal secara keseluruhan dan dari sistematika itulah dapat dijadikan satu arahan bagi pembaca untuk menelaahnya. Secara berurutan dalam sistematika ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Bab ini memberikan gambaran secara singkat terhadap inti pembahasan yang masih bersifat global. Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab ini dikemukakan tentang penelitian terdahulu yang membahas penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain yang serupa

¹⁹ Drs.H.Masyhud Ali,M.B.A,M.M, *Manajemen Risiko*,(Jakarta;PT.RAJAGRAFINDO PERSADA,2006)334

²⁰ Ibid,334

dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Dan kajian teori yang akan membahas tentang teori yang dijadikan landasan dalam melakukan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

Bab III : Bab ini menjelaskan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data analisis, keabsahan data dan tahap – tahap penelitian.

Bab IV : Bab ini menjelaskan tentang penyajian data dan analisis, gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan tentang temuan peneliti.

Bab V : Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan hasil penelitian serta saran – saran untuk penelitian.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah diteliti sebelumnya, perlu kiranya melakukan telaah terhadap penelitian – penelitian terdahulu. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian terdahulu, dan dimaksudkan agar dapat melihat relevansi dan sumber – sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Maka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan tema dalam penelitian ini, diantaranya yaitu :

1. **Dyahnita Adiningsih (2015)**, “Analisa Penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. BPR Artha Berkah Cermelang”. Merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survey. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Artha Berkah Cemerlang adalah “sukup baik”. BPR Artha Berkah Cemerlang telah melaksanakan GCG sesuai dengan rancangan peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan tata kelola (GCG) bagi bank perkreditan rakyat (BPR), namun masih terdapat beberapa unsur GCG yang harus diperhatikan oleh manajemen BPR. BPR Artha Berkah Cemerlang telah menerapkan prinsip akuntabilitas, prinsip responsibilitas, dan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan baik, namun penerapan prinsip transparansi dan prinsip independensi pada BPR Artha

Berkah Cemerlang belum optimal. Secara umum terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu membahas tentang *good corporate governance* dan obyek sama – sama di Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis penerapan *good corporate governance* untuk penelitian terdahulu, sedangkan untuk penelitian sekarang fokus penelitiannya terletak pada implementasi atau penerapan *good corporate governance* itu sendiri di Bank Perkreditan Rakyat Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.²¹

2. **Ryan Prasetya (2015)**, “ Analisis Perbandingan Dalam *Penerapan Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Sustainability* *return On Asset (ROA)* di Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara Bekasi dan Bogor”. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif dengan metode analisis statistik yang digunakan dengan menggunakan uji beda rata – rata yaitu uji beda *independent sampel T-tset*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance (GCG, Corporate Social Responsibility (CSR), dan Sustainability* terdapat perbedaan secara signifikan yang berada di wilayah Bekasi dan Bogor. namun variabel kinerja keuangan (ROA) tidak terdapat perbedaan yang signifikan di wilayah Bekasi dan Bogor. Hal ini ditunjukkan dengan hasil analisis da uji T menggunakan beda *independent sampel T-set*. Secara umum memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu,

²¹ Dyahnita Adiningsih, “*Analisa Penerapan Good Corporate Governance pada PT. BPR Artha Berkah Cermelang*” (Skripsi Universitas Gadjah Mada, 2015)

sama – sama mengenai penerapan *good corporate governance* dan obyek penelitiannya yaitu di Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk perbedaan terletak pada metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kawasan obyeknya juga berbeda kalau penelitian terdahulu di antara wilayah Bekasi dan Bogor, sedangkan penelitian sekarang obyeknya di wilayah Ambulu Kab. Jember.²²

3. **Sitti Fitriatul Jannah (2016)**, “Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *Fraud* di Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya)”. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian terdiri dari seluruh karyawan (kecuali bagian keamanan dan kebersihan) BPR di Surabaya yang listing di bank indonesia sebanyak 186 karyawan. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling sehingga total sampel sama dengan jumlah populasi yaitu sebanyak 186 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* BPR di Surabaya yang listing di Bank Indonesia. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* oleh Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang berarti penerapan *Good Corporate Governance* sudah sangat baik. Begitu pula pencegahan *fraud* BPR di Surabaya juga menunjukkan nilai yang sangat tinggi yang berarti

²² Ryan Prasetya, “Analisis Perbandingan dalam Penerapan *Good Corporate Governance*, *Corporate Social Responsibility*, *Sustainability Return On Asset (ROA)* di Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara Bekasi dan Bogor Tahun 2014”, (Skripsi, Universitas Islam Bandung, 2015)

pencegahan *fraund* BPR di Surabaya juga telah dilakukan dengan sangat baik. Secara umum terdapat kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama – sama mengambil penerapan *good corporate governance* di Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif, adanya pencakupan pencegahan *fraund* di Bank Perkreditan Rakyat sedangkan di penelitian sekarang tidak ada pencakupan *fraund* di Bank Perkreditan Rakyat yang akan diteliti dan penelitian terdahulu mengambil studi di Bank Perkreditan Rakyat yang ada di wilayah Surabaya, sedangkan penelitian sekarang mengambil obyek penelitian di Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Jember.²³

4. **Astri Aprianingsih (2016)**, “ Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance*, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2011 - 2014”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian kasual komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap keuangan perbankan. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangann

²³ Sitti Fitriatul Jannah, “*Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraund di Bank Perkreditan Rakyat (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya)*” (Skripsi Universitas Negeri Surabaya, 2016)

perbankan. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Dewan komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan. Secara umum ada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, sama – sama membahas bagaimana penerapan *good corporate governance*. Perbedaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan obyeknya penelitian terdahulu yaitu semua jenis perbankan yang telah terdaftar di BEI periode 2011 – 2014, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada obyek Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Jember.²⁴

5. **Topan (2016)**, “ Pengaruh Sistem Pengendalian *Intern*, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi pada BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta”. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

²⁴ Astri Aprianingsih, “*Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2014*”, (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, 2016)

dilakukan dengan metode *simple random sampling*. Sampel yang di peroleh sebanyak 35 responden. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Diolah dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian *intern* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *good corporate governance*. Secara umum terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu, sama – sama membahas tentang bagaimana penerapan *good corporate governance*. Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian kualitatif, untuk obyek penelitian terdahulu di BPRS wilayah Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang di BPR wilayah Jember.²⁵

6. **Dwi Kusuma Bhakti (2017)** yang berjudul “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Situbondo”. Merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah penerapan praktek GCG pada PT. Bank Syariah

²⁵ Topan “*Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Studi pada BPRS Bangun Drajat Warga (DBW) Yogyakarta)*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

Mandiri Kc Situbondo telah menegakkan prinsip – prinsip GCG sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009, yang ditunjukan untuk meningkatkan nilai kinerja korporasi serta citra korporasi melalui 5 pilar utama yaitu, *Transparancy, Accountbility, Responbility, Independency*, dan *Fairness*. Dengan penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri Kc Situbondo itu merupakan wujud pertanggungjawaban BSM kepada masyarakat bahwa BSM dikelola dengan baik, profesional dan hati – hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan *stakeholders*. Hasil *Self Assessment* dari penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri mendapatkan predikat “baik”, yang artinya secara keseluruhan penerapan GCG di PT. Bank Syariah Mandiri telah dilakukan dengan baik. Tetapi tetap harus ada beberapa indikator yang harus diperbaiki agar lebih baik lagi meski sudah berpredikat baik karena ini berkaitan dengan kepercayaan *stakeholders* dan kelayakan sebuah perusahaan. Secara umum terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini yaitu membahas tentang penerapan *good corporate governance* dan sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Situbondo, sedangkan obyek peneliti sekarang mengambil di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.²⁶

²⁶ Dwi Kusuma Bhakti, “Penerapan Good Corporate Governance (GCG)PT.Bank Syariah Mandiri Kc. Situbondo” (Skripsi, IAIN Jember, 2017)

7. **Markhaidir Ali Hadidaulah (2017)**, “ Analisis Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru.” Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 21. Data dalam penelitian ini merupakan data primer yaitu dalam bentuk kuisioner dengan menggunakan indikator variabel. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan Bank Perkreditan Rakyat yaitu sebanyak 17 BPR dengan jumlah responden sebanyak 68 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi, akuntabilitas, responbilitas dan kewajaran berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru. Sementara manajemen risiko berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap koefisien respon laba. Secara simultan transparansi, independensi , akuntabilitas, responbilitas, kewajaran dan manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Variabel independen pada penelitian ini dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 86,1%, sedangkan sisanya sebesar 13,9% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model regresi ini. Secara umum memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu sama – sama membahas implementasi *good corporate governance* di Bank Perkreditan Rakyat. Perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode

penelitian kuantitatif sedangkan metode penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.²⁷

8. **Dian Parini Bintarawati (2018)**, “ Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital* (Studi Kasus di PT. Bank Mega, Tbk. Periode 2012 – 2016)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2012 sampai 2016 aspek *risk profile* yang terdiri dari risiko kredit mendapatkan predikat sehat dengan nilai rata – rata 3 persen, risiko likuiditas mendaoatkan kriteria sangat sehat dengan nilai rata – rata sebesar 64,23 persen. Aspek *good corporate governance* (GCG) mendapatkan kriteria baik dengan nilai rata – rata 2,3. Aspek *Earning* mendapatkan kriteria sangat sehat dengan nilai rata – rata untuk ROA sebesar 2 persen dan untuk NIM rata – rata nilai yaitu 5,8 persen. Aspek capital mendapatkan kriteria sangat sehat dengan rata – rata sebesar 20,02 persen. Aspek RGEC secara keseluruhan pada tahun 2016 berada pada peringkat komposit 2 yaitu sehat. Secara umum kesamaan yang dimiliki penelitian terdahulu yaitu, sama – sama membahas tentang *good corporate governance*. Perbedaannya terletak pada metode penelitian, kalau penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode diskritif dengan obyek penelitian di PT. Bank Mega, kalau

²⁷ Markhaidir Ali Hadidaulah, “ Analisis Pengaruh Implementasi Good Corporate Governancae dan Manajemen Risiko terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2017)

penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan obyek penelitian di PT. BPR Ambulu Dhanaarta.²⁸

9. **Mukti Bagus Susilo (2018)**, “ Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016”. Merupakan penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang hubungan antara *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional terhadap profitabilitas yang di ukur dengan *retrun on assets*. Obyek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *puposive sampling* dengan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Hipotesis dala penelitian ini di uji dengan statistik deskritif dan metode analisis regresi berganda. Hasil uji statistik (uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *good corporate governance* yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan majerial, kepemilikan institusional mempengaruhi *return on asset*. Pengaruh variabel independen *good corporate governance* terhadap *return on assets* pada uji T bernilai signifikan. Secara umum kesamaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama – sama membahas tentang *good corporate governance* di suatu perusahaan keuangan. Untuk

²⁸ Dian Parini Bintarwati, “ *Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Risk Profile Good Corporate Governance, Earnings, Capital*” (Studi Kasus di PT. Bank Mega, Tbk. Periode 2012 – 2016)”, (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2018)

perbedaannya terletak pada metode yang di gunakan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif, obyek penelitian terdahulu di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sekarang obyeknya adalah Bank Perkreditan Rakyat Kab. Jember.²⁹

10. **MW Amelinda Eva E (2018)**, “Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPR RAM Semarang”. Merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus yang dilakukan pada salah satu bank perkreditan rakyat (BPR) di Semarang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran pada BPR RAM dilaksanakan dengan baik dan memiliki dampak yang positif meskipun masih terdapat kendala – kendala. Adapun kendala yang dihadapi berupa kurangnya pemahaman mengenai *Good Corporate Governance*, heterogenitas individu dan heterogenitas kebiasaan. Secara umum terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu yaitu membahas tentang bagaimana penerapan *good corporate governance* dan obyeknya sama – sama di Bank Perkreditan Rakyat, perbedaannya terletak pada obyek penelitian terdahulu meneliti di BPR yang bertempat di

²⁹ Mukti Bagus Susilo, “ *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016*” (Skripsi Diponegoro Semarang, 2018)

Semarang, sedangkan penelitian sekarang obyeknya meneliti di BPR yang bertempat di Jember.³⁰

TABEL PERSAMAAN dan PERBEDAAN

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Dyahrita Adiningsih (2015). “Analisa Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> pada PT. BPR Artha Berkah Cermelang”.	Secara umum terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu membahas tentang <i>good corporate governance</i> dan obyek sama – sama di Bank Perkreditan Rakyat.	Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus analisis penerapan <i>good corporate governance</i> untuk penelitian terdahulu, sedangkan untuk penelitian sekarang fokus penelitiannya terletak pada implementasi atau penerapan <i>good corporate governance</i> itu sendiri di Bank Perkreditan Rakyat Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
2.	Ryan Prasetya (2015). “Analisis Perbandingan Dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Sustainabilityreturn On Asset (ROA)</i> di Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) antara Bekasi dan Bogor.”	Secara umum memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, sama – sama mengenai penerapan <i>good corporate governance</i> dan obyek penelitiannya yaitu di Bank Perkreditan Rakyat.	Sedangkan untuk perbedaan terletak pada metode penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan kawasan obyeknya juga berbeda kalau penelitian terdahulu di antara wilayah Bekasi dan Bogor, sedangkan penelitian sekarang obyeknya di wilayah Ambulu Kab. Jember.
3.	Sitti Fitriatul Jannah (2016). “Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap pencegahan <i>Fraud</i> di Bank Perkreditan Rakyat (Studi	Secara umum terdapat kesamaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama – sama mengambil	Sedangkan untuk perbedaannya pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu

³⁰ MW Amelinda Eva E, “ *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BPR RAM Semarang*” (Skripsi Universitas Diponegoro, 2018)

	pada Bank Perkreditan Rakyat di Surabaya)".	penerapan <i>good corporate governance</i> di Bank Perkreditan Rakyat.	menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif, adanya pencakupan pencegahan fraud di Bank Perkreditan Rakyat sedangkan di penelitian sekarang tidak ada pencakupan fraud di Bank Perkreditan Rakyat yang akan diteliti dan penelitian terdahulu mengambil studi di Bank Perkreditan Rakyat yang ada di wilayah Surabaya, sedangkan penelitian sekarang mengambil obyek penelitian di Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Jember.
4.	Astri Aprianingsih (2016). "Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> , struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2011 - 2014".	Secara umum ada persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, sama – sama membahas bagaimana penerapan <i>good corporate governance</i>	Perbedaan yang dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan obyeknya penelitian terdahulu yaitu semua jenis perbankan yang telah terdaftar di BEI periode 2011 – 2014, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada obyek Bank Perkreditan Rakyat di wilayah Jember.
5.	Topan (2016). "Pengaruh Sistem Pengendalian <i>Intern</i> , Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan dan	Secara umum terdapat persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang	Sedangkan untuk perbedaannya terletak pada metode penelitian terdahulu menggunakan

	Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (Studi pada BPRS Bangun Drajat Warga (BDW) Yogyakarta”.	sekarang yaitu, sama – sama membahas tentang bagaimana penerapan <i>good corporate governance</i>	metode penelitian kuantitatif sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan penelitian kualitatif, untuk obyek penelitian terdahulu di BPRS wilayah Yogyakarta sedangkan penelitian sekarang di BPR wilayah Jember.
6.	Dwi Kusuma Bhakti (2017). “Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Situbondo.”	Secara umum terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu dan peneliti ini yaitu membahas tentang penerapan <i>good corporate governance</i> dan sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Sedangkan perbedaannya terletak pada obyek penelitian dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Situbondo, sedangkan obyek peneliti sekarang mengambil di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
7.	Makhaidir Ali Hadidaulah (2017). “Analisis Pengaruh Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> dan Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat di Pekanbaru”.	Secara umum memiliki persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang, yaitu sama – sama membahas implementasi <i>good corporate governance</i> di Bank Perkreditan Rakyat.	Perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan metode penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif.
8.	Dian Parini Bintarawati (2018). “Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i> (Studi Kasus di PT. Bank Mega, Tbk. Periode 2012 – 2016)”.	Secara umum kesamaan yang dimiliki penelitian terdahulu yaitu, sama – sama membahas tentang <i>good corporate governance</i> .	Perbedaannya terletak pada metode penelitian, kalau penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode diskritif dengan obyek penelitian di PT. Bank Mega, kalau penelitian sekarang menggunakan metode penelitian kualitatif dan obyek penelitian di PT. BPR Ambulu Dhanaarta.
9.	Mukti Bagus Susilo (2018), “ Pengaruh <i>Good</i>	Secara umum kesamaan yang	Untuk perbedaannya terletak pada metode

	<i>Corporate Governance</i> (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016”.	dimiliki penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama – sama membahas tentang <i>good corporate governance</i> di suatu perusahaan keuangan.	yang di gunakan oleh penelitian terdahulu yaitu menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode kualitatif, obyek penelitian terdahulu di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan penelitian sekarang obyeknya adalah Bank Perkreditan Rakyat Kab. Jember.
10.	MW Amelinda Eva E (2018). “Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada BPR RAM Semarang”.	Secara umum terdapat kesamaan antara peneliti terdahulu yaitu membahas tentang bagaimana penerapan <i>good corporate governance</i> dan obyeknya sama – sama di Bank Perkreditan Rakyat.	Perbedaannya terletak pada obyek penelitian terdahulu meneliti di BPR yang bertempat di Semarang, sedangkan penelitian sekarang obyeknya meneliti di BPR yang bertempat di Jember.

Sumber : data sudah dikelola

B. Kajian Teori

1. Pengertian Implementasi

Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan.³¹

Sedangkan secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam kamus besar bahasa Indonesia,

Implementasi berarti penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan

bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling

³¹ Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 427

menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa”³²

2. Pengertian Tata Kelola (*Good Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance/GCG*) di industri perbankan dideskripsikan sebagai suatu hubungan antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham.³³

Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas yang dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.³⁴

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate governance* ini juga mengandung pengertian mengenai peraturan atas pembagian tugas dan tanggung jawab di antara pihak atau para “*key players*” yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda – beda dalam perusahaan. Para pihak yang berkepentingan atas pengarahan dan pengendalian perusahaan itu meliputi,

³²Arinda Firdianti,M.Pdi,”*Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*”,ebook, ed.Elin Wiji Astuti,(Yogyakarta:CV.Gre Publishing),19.

³³Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Ghara Ilmu,2006),169

³⁴Rusdiyanto dkk, *Good Corporate Governance*(Bandung;PT.Refika Aditama,2019),105

dewan direksi, para manager, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.³⁵

Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.³⁶

Corporate Governance merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengurangi *agency problem* dengan meningkatkan pemantauan terhadap tindakan manajemen, membatasi perilaku oportunistik manajer, dan mengurangi risiko informasi yang ditanggung oleh pemegang saham.³⁷

Menurut komite *Cadbury*, *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dan memberikan pertanggungjawabannya kepada *shareholders* khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya dan penilaian kinerjanya.³⁸

³⁵ Drs.H.Masyhud Ali dkk, *Manajemen Risiko “Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis”*(Jakarta;PT.RajaGrafindo Persada,2006),334

³⁶ Drs.H.Masyhud Ali dkk, *Manajemen Risiko “Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis”*(Jakarta;PT.RajaGrafindo Persada,2006),106

³⁷ Rusdiyanto dkk, *Good Corporate Governance*(Bandung;PT.Refika Aditama,2019),106

³⁸ *Ibid*,209

Berdasarkan definisi diatas dapat, disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengacu pada struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk tujuan pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder.³⁹ Serta mencegah timbulnya kecurangan atau kesalahan dari pihak manajemen, yang dapat merugikan bagi *shareholders* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya.⁴⁰

Dan dapat juga di definisikan bahwa *Corporate Governance* sebagai seperangkat hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, atau *board of executive directors, stakeholders*, dan pemegang saham suatu perusahaan⁴¹. GCG menciptakan struktur yang membantu bank dalam:

- a. Menciptakan tujuan.
- b. Menjalankan operasi harian.
- c. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholder*) bank dengan beroperasi secara sehat dan baik.
- d. Menyesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku.
- e. Memproteksi kepentingan nasabah kreditur.⁴²

³⁹ Ibid,106

⁴⁰ Ibid,209

⁴¹ Drs.H.Masyhud dkk, *Manajemen Risiko "Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis"* (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada,2006), 334

⁴² Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Ghara Ilmu,2006),169

3. Struktur *Good Corporate Governance*

Tersedia banyak teknik dan strategi untuk menciptakan GCG yang bagus, yaitu :

- a. Nilai – nilai perusahaan (*corporate value*), aturan main (*code of conduct*) dan standar perilaku (*behavior*) yang sesuai dan sistem yang untuk memastikan kesesuaiannya.
- b. Strategi bank yang dirumuskan dengan baik, yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan seluruh jalannya usaha serta kontribusi individu di dalamnya.
- c. Kejelasan tugas bagi penanggung jawab serta otoritas pengambil keputusan, yang dipadukan dengan hirarki yang terpadu dalam suatu persetujuan dari bawah hingga direksi.
- d. Adanya mekanisme interaksi dan kerjasama di antara dewan komisaris, dewan direktur eksekutif, manajemen senior dan direktur.
- e. Sistem pengawasan yang kuat, meliputi fungsi audit internal dan eksternal, fungsi manajemen risiko yang independen dari lini bisnis, dan sistem check and balance lainnya.
- f. Pemantauan khusus atau suatu risiko dimana konflik kepentingan cukup kentara yang meliputi relasi bisnis dengan peminjam yang berafiliasi dengan bank, pemegang saham utama, manajemen senior atau pengambil keputusan utama dalam bank.
- g. Insentif finansial dan manajerial dijalankan dengan cara yang benar, yang harus ditawarkan kepada manajemen senior, lini bisnis

manajemen dan pegawai dalam bentuk kompensasi, promosi, dan bentuk penghargaan lainnya, serta.

- h. Intensif finansial dan majerial dijalankan dengan cara yang benar, yang harus ditawarkan kepada manajemen senior, lini bisnis manajemen dan pegawai dalam bentuk kompensasi, promosi, dan bentuk penghargaan lainnya, serta.
- i. Aliran informasi yang sesuai, baik secara internal maupun informasi kepada publik.⁴³

Struktur GCG pada bank memiliki banyak variasi. Penerapan GCG di setiap negara tidak disamakan karena adanya perbedaan dari struktur *governance* di setiap organisasi disamping itu juga adanya pengaruh budaya, sosial politik serta model hukum perusahaan yang diterapkan oleh suatu negara dimana bank tersebut berada. Meskipun tidak ada struktur tunggal yang dapat dikatakan ideal, namun terdapat beberapa isu *corporate governance* yang perlu diperhatikan untuk menjamin adanya checks and balances dalam struktur tersebut. Isu – isu tersebut adalah :

- a. Pengawasan oleh dewan komisaris, dewan direktur eksekutif atau dewan pengawas.
- b. Pengawasan oleh individu yang tidak terlibat dalam pelaksanaan harian dari berbagai area bisnis.
- c. Lini supervisi langsung berbagai area bisnis yang berbeda.
- d. Manajemen risiko dan fungsi audit yang independen.

⁴³ Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006),170

- e. Personil kunci dalam bank benar – benar “*fit dan proper*” untuk menempati posisinya, serta
- f. Pelaporan secara reguler.⁴⁴

4. Standar *Good Corporate Governance* pada Perbankan.

Komite Basel II menyatakan dalam “*Enhancing Good Corporate Governance in Banking Organization*” pada tahun 1999 tentang standar GCG secara efektif pada industri perbankan sebagai berikut :

- a. Bank harus menetapkan sasaran strategik dan serangkaian nilai - nilai perusahaan yang dikomunikasikan kepada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
- b. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
- c. Bank harus memastikan bahwa pengurus bank memiliki kompetensi yang memadai dan integritas yang tinggi serta memahami perannya dalam pengelolaan bank yang sehat dan independen terhadap pengaruh atau pengendalian pihak eksternal.
- d. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh direksi.
- e. Bank harus mengoptimalkan efektifitas peranan fungsi auditor eksternal (akuntan publik) serta satuan kerja audit internal.
- f. Bank harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah konsisten dengan nilai etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank.

⁴⁴ Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta; Graha Ilmu, 2006), 170

- g. Bank harus menerapkan praktek – praktek transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik.⁴⁵

5. Manfaat penerapan tata kelola (Good Corporate Governance)

Menurut Indra Surya dan Ivan Yustiavandana (2007) dalam Agoes (2009), mengatakan bahwa tujuan dan manfaat dari penerapan GCG adalah :

- a. Untuk dapat memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Untuk dapat menurunkan biaya modal (*cost of capital*).
- c. Untuk dapat memberikan suatu keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Untuk dapat meningkatkan keyainan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
- e. Untuk dapat melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.⁴⁶

6. Tujuan penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Penerapan sistem *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut :

- a. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan

⁴⁵ Ibid, 171

⁴⁶ Rusdiyanto, *Good Corporate Governance*(Bandung;PT.Refika Aditama,2019),211

merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.

- b. Meningkatkan kualitas organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders*.⁴⁷

Dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, dapat diketahui bahwa yang menjadi tujuan penerapan GCG bagi Bank Umum yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja Bank Umum.
- b. Melindungi kepentingan seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha bank umum (*stakeholders*).
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku umum pada industri perbankan.
- d. Memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan API (Arsitektur Perbankan Indonesia).⁴⁸

⁴⁷Muhammad Yusuf Hidayat, "GCG (Good Corporate Governance)", <http://www.tugasakuntansi.blogspot.co.id/2015/05artikel-baik-gcggood-corporate.html?m=1> (11 November 2019)

⁴⁸Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum (13 November 2019, jam 10.18)

7. Prinsip – prinsip Good Corporate Governance.

Dalam penerapan *good corporate governance* (GCG), perusahaan telah menganut pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh komite nasional kebijakan governance (KNKG) dengan penerapan tarif, sebagai lima pilar dasar dari GCG yaitu : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*).⁴⁹

a. Keterbukaan (*transparency*)

Perusahaan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahun, dan laporan keuangan yang diaudit, laporan tahunan, dan laporan insidental, yang antara lain dengan aksi korporasi, transaksi, afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik.⁵⁰

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan pilar akuntabilitas oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengesampingkan kepentingan perusahaan, untuk menjaga akuntabilitasnya perusahaan juga memastikan bahwa semua bagian dalam perusahaan dan karyawan

⁴⁹ Rusdiyanto,SE.,M.Ak, *Good Corporate Governance*,(Bandung; PT.Refika Aditama,2019)hlm 106-107

⁵⁰ Ibid, 107

memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usahanya perusahaan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan seminar, baik didalam maupun diluar perusahaan, untuk pengembangan kompetensinya.⁵¹

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa perusahaan, namun juga masyarakat yang ada disekitar tempat kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pejuang jasa perseroan, namun juga masyarakat yang ada disekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat perusahaan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha perusahaan tidak hany berupa penyediaan lapangan pekerjaan, namun juga dengan berbagai program tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility*).⁵²

d. Independensi (*independency*)

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan

⁵¹ Rusdiyanto,SE.,M.Ak, *Good Corporate Governance*,(Bandung; PT.Refika Aditama,2019)hlm 107

⁵² Ibid, 108

senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan.⁵³

e. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kesetaraan dan kewajaran diterapkan oleh perusahaan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing – masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan *stakeholders* kepada perusahaan.⁵⁴

8. Penerapan *Good Corporate Governance* pada Perbankan.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada perbankan yaitu :

a. Menentukan tujuan strategi dan nilai – nilai perusahaan

Sangat penting bagi bank untuk menentukan tujuan starteginya secara jelas dan menentukan “etos” perusahaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pihak di Bank.⁵⁵

Bank yang tidak memiliki tujuan startegi akan mengalami kesulitan dalam mengatur aktivitasnya karena kurang fokus dalam penggunaan sumber dayanya. Dengan menetapkan etos perusahaan,

⁵³ Ibid, 108

⁵⁴ Ibid, 108

⁵⁵ Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006),171

bank akan dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan nilai – nilai yang jelas.⁵⁶

Penentuan nilai – nilai perusahaan ini harus diaplikasikan pada semua pihak bank, tidak terkecuali dewan direktur. Mereka harus mendorong adanya pelaporan masalah secara berkala dan melarang korupsi dan penyuapan baik secara internal maupun eksternal. Nilai – nilai ini harus didukung dengan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya hal – hal yang dapat menghambat pelaksanaan GCG. Misalnya kebijakan untuk penentuan prosedur yang harus diikuti pegawai jika pekerjaannya menghadirkan konflik kepentingan dengan kepentingannya luar. Kebijakan yang jelas akan memperkuat nilai – nilai bank dalam mengatasi berbagai situasi yang mungkin timbul.

Dewan direktur harus memastikan sistem dan proses tersebut berjalan, dapat dimonitor dan dilaporkan sesuai dengan kebijakannya.⁵⁷

b. Lini tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas

Agar lebih efektif dalam memantau dan mengawasi aktivitas bank, maka dewan direksi harus menetapkan lini otoritas dan tanggung jawab dengan jelas. Proses ini juga harus meliputi para direksi sendiri.⁵⁸

Semua area aktivitas bisnis harus mempunyai lini akuntabilitas yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa semua permasalahan akan mendapatkan respon yang terfokus dari manajemen. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur sistem, dan pertanggung-jawaban

⁵⁶ Ibid, 171

⁵⁷ Ibid, 171-172

⁵⁸ Ibid, 172

organisasi perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana dengan baik. Setiap individu dalam bank harus jelas dalam tingkat otoritasnya. Disamping itu, setiap individu dalam bank harus jelas dalam tingkat otoritasnya. Disamping itu, setiap individu harus memahami tingkat otoritas orang lain yang menjadi mitra mereka dalam interaksi pekerjaan.⁵⁹

Lini akuntabilitas yang jelas dapat menciptakan lingkungan yang stabil untuk manajemen operasional bank sehari – hari dan memungkinkan dilakukannya proses pengambilan keputusan secara efisien. Tanggung jawab dari masing – masing lini dalam sebuah bank dapat di rinci sebagai berikut :⁶⁰

1) Tanggung jawab dewan direksi

Dewan direksi (atau yang singkat) memiliki tanggung jawab paling tinggi atas manajemen dan kinerja bank. Oleh karena itu seorang direktur harus :

- a) Mempunyai kualifikasi yang baik dalam bidang yang ditanganinya.
- b) Memahami perannya dalam kerangka GCG, dan
- c) Tidak terpengaruh oleh faktor – faktor lain baik internal maupun eksternal.⁶¹

Direksi harus memastikan bahwa mereka memperoleh informasi yang lengkap sebelum memberikan penilaian mengenai

⁵⁹ Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006), 172

⁶⁰ Ibid, 172

⁶¹ Ibid, 172

kinerja manajemen bank yang independen dari pandangan manajemen, pemegang saham atau pemerintah. Kewajiban legal Dewan Direksi dapat diringkas meliputi kewajiban fidusia, kewajiban kesetiaan, kewajiban perhatian, kewajiban untuk tidak berkubu dan kewajiban melakukan pengawasan. Apabila dijabarkan dalam konteks perbankan, Dewan Direksi yang kuat akan :⁶²

- a) Memahami peran pegawasannya dan tugas loyalitasnya pada bank dan pemegang saham.
- b) Menjalankan fungsi “*check and balance*” dalam kaitannya dengan manajemen harian bank.
- c) Memiliki otoritas untuk bertanya kepada manajemen Bank dan dapat menerima penjelasan dari manajemen Bank.
- d) Merekomendasikan cara pelaksanaan yang lebih baik yang dipelajari dari situasi lain.
- e) Memberikan nasehat yang bijaksana.
- f) Tidak campur tangan secara berlebihan.
- g) Menghindari konflik kepentingan aktivitasnya dan menghindari untuk mempunyai komitmen pribadi kepada organisasi lain.
- h) Secara teratur bertemu dengan manajemen senior dan auditor internal untuk menentukan dan menyetujui kebijakan, menentukan lini komunikasi dan memonitor kemajuan Bank dalam mencapai tujuannya.

⁶² Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006), 172 - 173

- i) Tidak ikut mengambil keputusan jika dirasa tidak mampu memberikan nasehat yang objektif.
- j) Tidak turut ikut campur dalam manajemen Bank sehari – hari.⁶³

Pada intinya, Dewan Direksi harus memahami risiko – risiko untuk semua aspek bisnis yang dijalankan perusahaan dan mengenali bahwa keputusan bisnis membutuhkan adanya risiko. Targetnya adalah mencapai keseimbangan yang baik antara risiko yang ada dan hasil bagi pemegang saham.⁶⁴

Kualitas penerapan prinsip – prinsip GCG adalah keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*) akan tergantung pada seberapa jauh dewan direksi menerapkan prinsip – prinsip tersebut secara konsisten dalam tindakannya. Ketika berhubungan dengan manajemen risiko, dibutuhkan dua syarat, yaitu independensi dan kompetensi dewan direksi.⁶⁵

Independensi dewan direksi dibutuhkan untuk menjamin bahwa perusahaan akan tetap menjaga rasa keadilan kepada semua *stakeholder* khususnya pemegang saham minoritas, melindungi mereka dari penipuan, atau kesalahan yang dibuuh pihak internal. Independensi juga akan mendorong adanya transparansi perusahaan

⁶³Ibid, 173

⁶⁴Ibid, 173

⁶⁵Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006), 173

terhadap semua *stakeholder* melalui peningkatan keterbukaan informasi atas risiko – risiko yang dihadapi.⁶⁶

Yang kedua yaitu kompetensi dewan direksi dibutuhkan guna menjamin bahwa dewan direksi dilengkapi dengan hak, peralatan, dan metodologi manajemen risiko yang efektif, tidak ada kesempatan dan waktu melakukan pendekatan coba – coba (*trail and error*).⁶⁷

Sebagai tambahan, dalam membantu dewan direksi dalam bertugas, bank juga bisa membentuk komite khusus agar anggota dewan direksi dapat melihat area yang lebih spesifik. Komite ini dapat meliputi berbagai area sebagai berikut :

a) Komite manajemen risiko

Memberikan pengawasan pada aktivitas manajemen senior dalam mengelola kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum dan risiko lain yang dihadapi bank.⁶⁸

b) Komite audit

Memberikan pengawasan pada auditor bank internal dan eksternal serta memastikan manajemen tersebut melakukan tindakan korektif yang tepat secara berkala dan dapat mengontrol kelemahan, ketidaksesuaian dengan kebijakan hukum dan regulasi. Komite audit adalah satu komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dan bertanggungjawab kepada

⁶⁶ Ibid, 174

⁶⁷ Ibid, 174

⁶⁸ Ibid, 174

dewan komisari dengan tugas dan tanggungjawab untuk memastikan bahwa prinsip – prinsip GCG terutama transparansi dan keterbukaan yang diterapkan secara konsisten dan memadai oleh para eksekutif.⁶⁹

Komite audit mempunyai tugas utama untuk melindungi kepentingan pemegang saham ataupun pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan melakukan tinjauan atas reabilitas dan integritas informasi dalam laporan keuangan dan laporan operasional lain beserta kriteria untuk mengukur, melakukan klasifikasi dan penyajian dari laporan tersebut. Untuk alasan tersebut, profesi akuntan sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting untuk menegakkan prinsip akuntabilitas.⁷⁰

c) Komite Remunerasi

Memberikan pengawasan mengenai kompensasi manajemen senior dan pejabat penting lainnya serta memastikan kompensasi konsisten dengan budaya, tujuan, strategi, dan kontrol lingkungan Bank tersebut.⁷¹

2) Pengawasan manajemen senior

Elemen kunci dalam GCG adalah adanya kelompok orang yang bertanggung jawab atas jalannya kegiatan bank. Kelompok yang dimaksud adalah manajemen senior. Manajemen senior harus memiliki pandangan yang komprehensif atas lini manajemernya, sama

⁶⁹Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006) , 174

⁷⁰ Ibid, 175

⁷¹ Ibid, 175

dengan fungsi pertimbangan yang diberikan oleh dewan direksi. Keputusan manajemen strategi harus dibuat oleh lebih dari satu manajer. Sebagai tambahan, situasi manajemen seperti dibawah ini harus dihindari :

- a) Manajer senior yang terlibat terlalu jauh dalam pengambilan keputusan lini bisnis.
- b) Manajer senior yang menangani suatu area tapi tidak mempunyai latar belakang kemampuan dan pengetahuan yang sesuai.
- c) Manajer senior yang tidak mau melakukan pengawasan yang semestinya terhadap atas suatu keberhasilan, dimana biasanya setiap keberhasilan diiringi dengan pengawasan yang longgar terhadap karyawan atau bagian yang sukses. Selain itu manajer senior yang tidak mau melakukan pengawasan kepada pegawai yang mempunyai posisi penting karena takut kehilangan mereka.⁷²

3) Peran auditor internal dan eksternal.

Auditor internal dan eksternal mempunyai peran yang penting dalam kerangka GCG. Salah satu fungsi utama auditor internal adalah menjamin berjalannya prosedur sebagaimana fungsi yang seharusnya (*compliance*) dan mencegah terjadinya transaksi keuangan dan kecurangan lain yang menyimpang.⁷³ Secara prinsip, auditor eksternal harus ditunjuk dalam rapat umum pemegang saham

⁷² Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006), 175 - 176

⁷³ Ibid, 176

(RUPS) dari calon yang diajukan oleh dewan komisaris berdasarkan usulan komite auditor. Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, dan *stakeholders*. Para auditor eksternal harus memberitahu bank melalui komite audit mengenai kejadian dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.⁷⁴

4) Kebijakan kompensasi dan remunerasi

Dewan direksi perlu mengembangkan kebijakan kompensasi yang mencerminkan budaya, tujuan, strategi dan pengawasan pada lingkungan bank. Dewan ini harus menentukan kompensasi untuk manajemen senior dan personil penting lainnya dalam bank.⁷⁵

Skema kompensasi harus dirancang untuk memotivasi manajemen senior agar dapat memberikan yang terbaik bagi bank. Dewan direksi selanjutnya tidak menetapkan ukuran kinerja jangka pendek yang justru dapat menimbulkan risiko jangka panjang. Skala gaji harus ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak ada pegawai yang mengandalkan pada kinerja jangka pendek dengan orientasi guna memperoleh pendapatan yang banyak.⁷⁶

5) Transparansi

Good corporate governance dapat dijalankan dengan tingkat transparansi yang tinggi. Oleh karena itu pemberian informasi ke publik (*public disclosure*) harus meliputi :

⁷⁴ Ibid, 176

⁷⁵ Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan*(Yogyakarta;Graha Ilmu,2006, 177

⁷⁶ Ibid, 177

- a) Struktur dewan direksi (ukuran, keanggotaan, kualifikasi, dan komite).
- b) Struktur manajemen senior (tanggungjawab, lini laporan, kualifikasi dan pengalaman).
- c) Struktur organisasi dasar (struktur lini bisnis, struktur entitas hukum)
- d) Informasi tentang struktur insentif bank (kebijakan pendapatan, kompensasi eksekutif, bonus, *stock option*), dan
- e) Karakter dan tingkat transaksi dengan afiliasi dan pihak terkait lainnya.

Pada prakteknya, GCG pada industri perbankan difokuskan kepada tanggung jawab pengelolaan bank yang sehat oleh komisaris dan dewan direksi.⁷⁷

⁷⁷ Ibid, 177

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷⁸

Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau “in situ”. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.⁷⁹

B. Lokasi Penelitian.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada perusahaan yang bergerak di bidang lembaga keuangan perbankan, tepatnya PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember, jalan Raya Suyitman No. 59 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.

Alasan peneliti mengadakan penelitian di BPR Ambulu Dhanaarta karena BPR Ambulu Dhanaarta merupakan salah satu Bank Perkreditan

⁷⁸ Prof. Dr Lexy J.Moleong,M.A, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; PT. Remaja Rosdakarya,2016), hal 6

⁷⁹ Ibid, hal 26

Rakyat yang sudah berdiri selama 30 tahun, memiliki 1 kantor cabang dan 2 kantor kas. Selain itu pada 2nd infobank BPR AWARDS 2011, BPR Ambulu Dhanaarta Jember mendapat predikat sangat bagus atas kinerja keuangan selama tahun 2010, dan BPR Ambulu Dhanaarta Jember mendapatkan penghargaan BPR berkinerja Terbaik Se-Wilayah kerja kantor Bank Indonesia Jember tahun 2008 untuk kategori Bank Perkreditan Rakyat, juga PT. BPR Ambulu Dhanaarta Jember mendapatkan peringkat pertama kategori Bank Perkreditan Rakyat dalam penghargaan Perbankan berkinerja Terbaik Se-Wilayah Kerja Kantor Bank Indonesia Jember tahun 2009.⁸⁰

C. Subyek Penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan subyek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yakni teknik pengambilan informan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang di teliti.⁸¹ Adapun subyek dalam penelitian ini yaitu :

1. Ibu Novi selaku Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan manajemen risiko PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
2. Ibu Antok selaku ke Pejabat Eksekutif Audit PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
3. Bapak Arie Rahmat selaku Pejabat Eksekutif Kredit PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.

⁸⁰ Website BPR Ambulu Dhanaarta,(1 november 2019, jam 19.00)

⁸¹ Prof.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2018), hal 218

4. Ibu Ika selaku Pejabat Eksekutif Operasional PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.

D. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸²

Sedangkan untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya :

1. Wawancara (*Interview*).

Wawancara (*interview*) merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸³

Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self report* atau setidaknya – tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.⁸⁴

Dalam hal ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpulan

⁸²Prof.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2018) , hal 224

⁸³ Prof.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2018) hal 231

⁸⁴ Ibid, hal 231

data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan – pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah di siapkan.⁸⁵

Adapun teknik wawancara ini digunakan untuk memperoleh data tentang :

- a. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
 - b. Apa saja kendala implementasi *Good Corporate Governance* pada Bank Perkreditan Rakyat di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
2. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data atau variabel dari sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dari subyek penelitian berupa sejumlah dokumen, catatan, buku, transkrip, surat kabar, brosur, *website*, majalah, makalah – makalah dan lain – lain. Maka dalam konteks penelitian ini penulis menggunakan brosur dan *website* dalam mencari data.

E. Analisis Data.

Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman yaitu aktivitas dalam analisis data *reduction*, data *display*, dan *conclusin*. Dalam hal ini aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁸⁶

1. Data *Reduction* (Reduksi Data). Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal – hal yang pokok, memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian akan memberikan gambaran

⁸⁵ Ibid, hal 233

⁸⁶ Prof.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung; Penerbit Alfabeta, 2018) hal 246

yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.⁸⁷

2. *Data display* (Penyajian Data). Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *phi card*, *pictogram*, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁸⁸
3. *Conclusion Drawing* (Verification). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang – remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.⁸⁹

F. Keabsahan Data.

Dalam menguji keabsahan data yang ada penyusun menggunakan triangulasi. Triangulasi sebagai teknik pengumpulan data berarti peneliti tidak hanya menggunakan satu teknik saja, tetapi menggabungkan berbagai macam

⁸⁷ Ibid, hal 247-249

⁸⁸ Ibid, hal 249

⁸⁹ Ibid, hal 252 - 253

teknik pengumpulan dan sumber data. Disini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan data.⁹⁰

G. Tahap – tahap Penelitian.

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan. Tahap – tahap penelitian diklasifikasikan menjadi beberapa tahapan yang meliputi :

1. Tahap sebelum di lapangan.
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.
 - b. Menyusun Proposal Penelitian.
 - c. Mengurus suat perizinan (jika diperlukan)
2. Tahap pelaksanaan penelitian.

Pada tahap ini peneliti mengadakan wawancara dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data, antara lain adalah pejabat eksekutif kepatuhan dan manajemen risiko, pejabat eksekutif audit, pejabat eksekutif kredit, dan pejabat eksekutif operasional PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember.

3. Tahap penyelesaian.

Tahap penyelesaian merupakan tentang tahap paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah

⁹⁰ Dr. M. Djamal, M.Pd, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2015) hlm 92

dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah PT. BPR Ambulu Dhanaartha

Sejarah berdiri pendirian PT. BPR Ambulu Dhanaartha berawal dari pemikiran para pemegang saham dengan melihat kondisi perekonomian wilayah kecamatan Ambulu pada saat itu yang kelihatan paling maju dibandingkan dengan kecamatan – kecamatan lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Hal ini karena masyarakatnya yang sebagian besar sebagai petani tembakau sehingga sudah saatnya membutuhkan jasa – jasa perbankan baik untuk kredit modal kerja pada saat mulai tanam dan untuk menyimpan dana baik berupa Tabungan atau Deposito pada saat panen raya.

Agar ide tersebut dapat segera di realisasikan pada waktunya dengan menentukan gambar logo dan nama yang sesuai dengan keinginan para pemegang saham terciptalah sebuah Lembaga Keuangan dengan nama “ PT. Bank Perkreditan Rakyat Ambulu Dhanaartha” berbadan hukum dengan akta pendirian No. 2 tanggal 31 Maret 1989 yang dibuat oleh Notaris Bernard Lamak, SH yang berkedudukan di Jember dan telah diperbaiki dengan Akta tertanggal 15 Mei 1989 yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH, yang berkedudukan di Jakarta sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-4609.HT.01.01-TH.89 tertanggal 23 Mei 1989. Ijin usaha oleh

Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-077/KM.13/1989, Tanggal 14 Juli 1989 dengan modal awal pada saat itu sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan mengalami beberapa perubahan hingga saat ini sudah menjadi Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) berikut perubahan-perubahan yang telah terjadi yaitu :

- a. Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 09 tanggal 11 Juli 2008 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar dengan UU PT. No 40 Tahun 2007.
- b. Akta Notaris Bernard Lamak, SH., Akta No. 01 tanggal 06 Januari 2011 tentang Perubahan Kepemilikan Pemegang Saham.
- c. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 416 tanggal 29 Juli 2013 tentang Perubahan Modal Dasar dan Modal Disetor.
- d. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 451 tanggal 15 Januari 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Direksi.
- e. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 02 tanggal 02 September 2014 tentang Perubahan Pengurus Dewan Komisaris.
- f. Akta Notaris Eko Prasetyo Lamak, SH., M., Kn. Akta No. 16 tanggal 22 Juni 2015 tentang Perubahan Modal Penambahan Modal Disetor.
- g. Akta Shella Norma Yunita Almega, SH., M., Kn. Akta No. 29 tanggal 18 Desember 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Pengurus Dewan Direksi.⁹¹

⁹¹ Website BPR Ambulu Dhanaarta,(1 november 2019, jam 19.00)

Tanggal mulai operasional perdana yaitu pada tanggal, 25 November 1989 dan berkedudukan Kantor Pusat di Jl. Raya Suyitman No. 59 Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur.⁹²

Pasca berdirinya PT. BPR Ambulu Dhanaartha di kecamatan Ambulu perekonomian menunjukkan semakin meningkat sehingga pesaing – pesaing baru bermunculan akan tetapi tidak berpengaruh terhadap perkembangan PT. BPR Ambulu Dhanaartha karena berkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat maupun mitra usaha sehingga tetap eksis dan mampu melakukan ekspansi untuk membuka kantor cabang di wilayah kecamatan Rambli Puji pada bulan Maret 1997 dan 1 kantor kas di kecamatan Summersari (Kota Jember) pada bulan Juli 2006 dan 1 kantor kas di kecamatan Sukowono pada bulan April 2008.⁹³

2. Visi dan Misi PT. BPR Ambulu Dhanaartha

a. Visi

Menjadi Bank terdepan, Tangguh, dan Profesional berguna bagi masyarakat.⁹⁴

b. Misi

- 1) Berperan dalam pengembangan pembangunan ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan pertumbuhan perusahaan

(Corporate Growth).

⁹² Website BPR Ambulu Dhanaarta,(1 november 2019, jam 19.00)

⁹³ Ibid

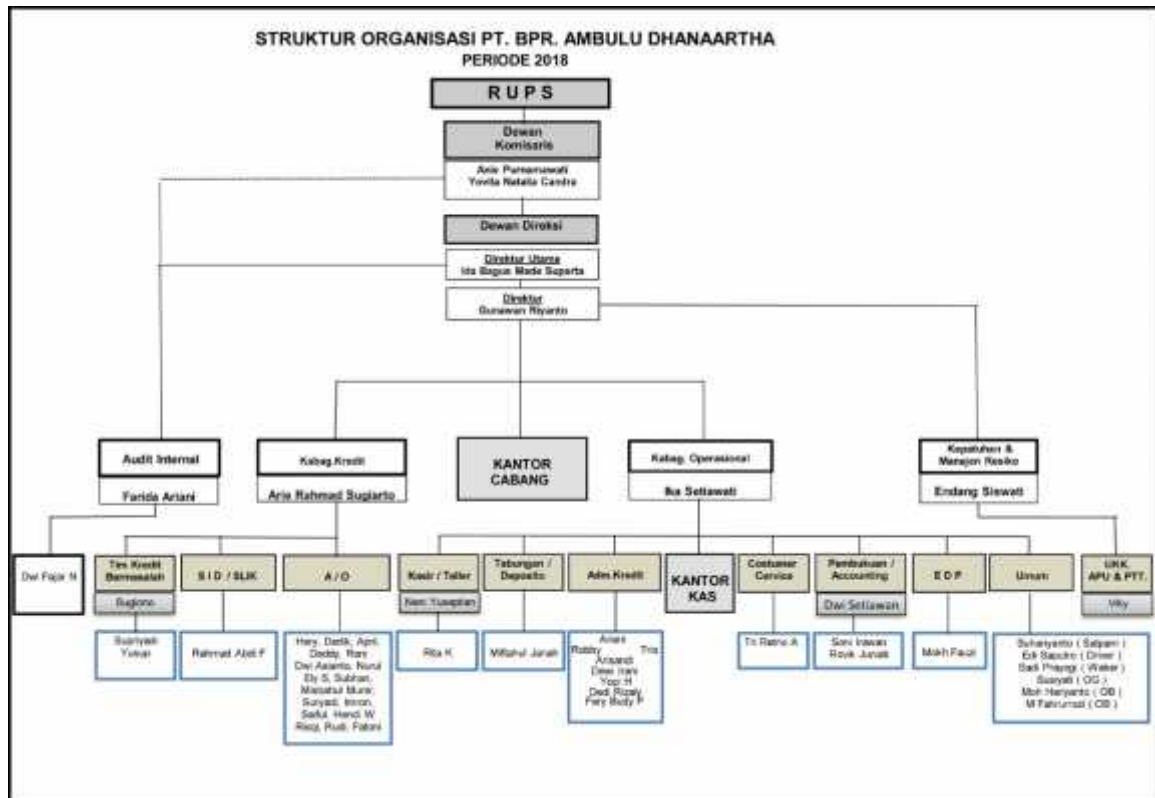
⁹⁴ Website BPR Ambulu Dhanaartha, (1 November 2019, jam 19.00)

- 3) Meningkatkan pengelolaan BPR berdasarkan Tata Kelola BPR yang berbasis Manajemen Risiko sesuai dengan POJK No. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan untuk menuju BPR yang pengelolaannya yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).
- 4) Meningkatkan jumlah dana pihak ke 3 (tabungan dan deposito) baik kualitas maupun kuantitasnya, meningkatkan penyaluran kredit dan meningkatkan kualitas aktiva produktif.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan berkualitas.
- 6) Memelihara dan meningkatkan mutu budaya kerja karyawan, sehingga dapat meningkatkan kinerja BPR.⁹⁵

⁹⁵ Website BPR Ambulu Dhanaartha,(1 November 2019,19.00)

3. Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha

Gambar 4.1
Struktur Organisasi PT. BPR Ambulu Dhanaartha



Sumber : Dokumen Struktur Organisasi BPR Ambulu Dhanaartha.

4. Produk – produk PT. BPR Ambulu Dhanaartha

a. Tabungan

1) Tabungan Bunga Harian

- Bunga 5% / tahun.
- Penabung adalah semua lapisan masyarakat perorangan.
- Setoran awal Rp. 10.000,-
- Setoran selanjutnya tidak terbatas minimal Rp. 5000,-
- Bunga di perhitungkan untuk saldo minimal Rp. 10.000,-
- Bunga dihitung berdasarkan saldo harian.

- g) Pembebanan bunga dilakukan pada akhir bulan yang bersangkutan dan langsung dikreditkan pada saldo penabung.
- h) Biaya penutupan rekening RP. 5000,-
- i) Penyetoran dan pengambilan sewaktu – waktu sesuai jam kas.
- j) Setiap pendapatan bunga akan dikenakan pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k) Suku bunga tabungan ditetapkan oleh pihak bank, dan jika terjadi perubahan suku bunga, akan segera diberlakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung.
- l) Tabungan bunga harian yang tidak meelakukan transaksi selama 24 bulan berturut – turut oleh pihak bank akan digolongkan sebagai tabungan Non Aktif.

2) Tabungan Non Aktif

- a) Tabungan bunga harian yang saldonya diatas RP.10.000,- yang tidak pernal melakukan transaksi selama 24 bulan berturut – turut.
- b) Setiap bulannya akan dipotong oleh pihak bank untuk biaya administrasi sebesar Rp. 2500,- dan tidak diperhitungkan bunga.
- c) Apabila saldonya sudah mencapai dibawah Rp. 10.000,- akan ditutup secara otomatis tanpa perlu pemberitahuan.⁹⁶

⁹⁶ dokumentasi

b. Deposito Berjangka PT. BPR Ambulu Dhanaartha

Deposan adalah semua lapisan masyarakat perorangan / Badan Usaha / Yayasan / Perkumpulan baik terkait maupun tidak terkait.

Tabel 4.2
Deposito Berjangka PT. BPR Ambulu Dhanaartha

NO	Nominal Rupiah	Tenor	
		1-3 Bulan	6-12 Bulan
1.	1 Juta s/d < 50 Juta	5.25%	5.00%
2.	50 Juta s/d < 100 Juta	5.50%	5.25%
3.	100 Juta s/d < 250 Juta	6.00%	6.00%
4.	250 Juta s/d < 500 Juta	6.25%	6.25%
5.	500 Juta s/d < 1 Miliar	6.50%	6.50%
6.	1 Miliar	7.00%	7.00%

Sumber : Dokumentasi

Keterangan : Pemberian suku bunga di atas counter rate berlaku komulatif dengan syarat tertentu. Untuk tingkat suku bunga yang wajar sesuai dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) 8,50% periode 25 Januari 2020 s/d 29 Mei 2020.⁹⁷

c. Kredit PT. BPR Ambulu Dhanaartha

1) Pinjaman Flat / Angsuran

a) Angsuran Pokok + Bunga setiap bulan sesuai jangka waktu.

Jangka waktu kredit maksimal 36 Bulan.

b) Bunga 1,50% Perbulan.

⁹⁷ dokumentasi

2) Pinjaman 6 Bulanan

- a) Hanya bayar bunga saja setiap bulan kemudian pada saat jautub tempo trakhir pokok + bunga 1 bulan dibayar lunas.
- b) Jangka waktu kredit maksimal 6 bulan.
- c) Bunga 2,50 % perbulan.

3) Pinjaman 4 Bulanan

- a) Pokok + bunga dibayar sekaligus lunas pada saat tempo kredit.
- b) Jangka waktu maksimal 4 bulan.
- c) Bunga 3,00 % perbulan.

4) Pinjaman Tarik Setor (PRK)

- a) Pinjaman Traik Setor dengan fasilitas penarikan dana bisa sewaktu – waktu, dengan syarat selama saldo dan pembebanan bunganya masih dibawah plafon kredit yang diberikan.
- b) Dengan jangka waktu maksimal 12 bulan (1 tahun).
- c) Bunga 2,00 % perbulan.

Provisi / administrasi dibedakan pada saat akad sesuai plafon akad kredit potongan 3,00 %.⁹⁸

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisis data yang relevan. Sebagaimana yang telah di jelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,

⁹⁸ dokumentasi

wawancara, dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data – data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember

Dalam meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap perundang – undangan yang berlaku serta nilai – nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan struktur, prosedur dan mekanisme yang dirancang untuk pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan.

Hal ini disampaikan oleh Ibu Dwi Noviani Lestari selaku Pejabat Eksekutif bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko di PT. BPR Ambulu Dhanaartha saat saya temui di kantornya, beliau menyampaikan bahwa :

“Dalam setiap kegiatan usahanya PT. BPR menerapkan prinsip GCG dan berpedoman pada prinsip GCG pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata kelola (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat. Karena dengan berpedoman pada prinsip GCG bank tersebut dapat dikatakan bawa bank tersebut sehat. Dengan begitu juga dengan PT. BPR Ambulu Dhanaartha termasuk Bank Perkreditan Rakyat yang sehat, karena kalau tidak sehat maka tidak akan menerapkan GCG yang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan di PT BPR Ambulu Dhanaartha sudah menerapkan 5 prinsip GCG yang ada di

Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015. Kelima prinsip tersebut yaitu, transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi serta prinsip kewajaran dan kehati – hatian. Dalam prinsip keterbukaan (*transparancy*), kebijakan PT. BPR Ambulu Dhanaartha harus tertulis dan dikomunikasikan kepada stakeholders atau masyarakat umum yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Pada prinsip akuntabilitas (*accounbility*), PT. BPR Ambulu Dhanaartha menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada masing - masing organ anggota dewan komisaris dan direksi serta seluruh jajaran yang dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai – nilai perusahaan, serta sasaran usaha dan strategi yang dimiliki oleh PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Begitu pula dengan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), PT. BPR Ambulu Dhanaartha berpegang pada prinsip kehati – hatian (*Prudential Banking Principles*) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip independensi (*independency*), disini PT. BPR Ambulu Dhanaartha menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Dan prinsip kewajaran (*fairness*), disini PT. BPR Ambulu Dhanaartha memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* atau masyarakat umum berdasarkan kesetaraan dan kewajaran yang memang sangat penting.”⁹⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Antok selaku Pejabat Eksekutif bagian Audit Internal di PT. BPR Ambulu Dhanartha saat saya temui di meja kantornya :

“Prinsip GCG sangat perlu diterapkan, karena prinsip GCG ini sangat penting bagi kelayakan bank itu sendiri. Bank itu sehat atau tidak. Dan juga GCG itu merupakan pertanggung jawaban kita sebagai bank kepada masyarakat bahwa bank tersebut di kelola dengan baik dan sehat. Dan itu juga sejalan dengan tujuan dengan diterapkannya tata kelola (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yaitu, untuk meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi kewajaran dan kehati – hatian dalam pengelolaan BPR.”¹⁰⁰

⁹⁹ Bu Novi, Wawancara, Jember, 5 Maret 2020.

¹⁰⁰ Bapak Antok, Wawancara, Jember 2 Maret 2020

Hal yang samapun juga disampaikan oleh Bapak Arie selaku Pejabat Eksekutif Kredit di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yang saya temui di meja kantor, beliau menyampaikan :

“ PT. BPR Ambulu Dhanaartha sudah mampu menerapkan semua 5 prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada lembaga keuangan yang ada di masyarakat ini, maka masyarakat ini juga tidak akan was - was ataupun takut kepada lembaga keuangan tersebut untuk melakukan transaksi keuangan. Dan dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha, maka PT. BPR Ambulu Dhanaartha sudah menerapkannya sesuai dengan Peraturan OJK yang sudah diberlakukan untuk Bank Perkreditan Rakyat.”¹⁰¹

Senada dengan juga yang disampaikan oleh Ibu Ika Setyawati selaku Pejabat Eksekutif bagian Operasional di PT. BPR Ambulu Dhanaartha saat saya wawancarai di kantornya. Beliau menyampaikan :

“Dalam penerapan GCG itu sangatlah penting bagi setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, prinsip – prinsip yang di perlukan dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan pada semua pemangku kepentingan, terutamanya untuk kepentingan stakeholders atau masyarakat umumnya dan nasabah – nasabah PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Salah satu contohnya prinsip GCG semisal transparansi, terkait transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, kita sampaikan laporan keuangan kita setiap satu tahun sekali secara tepat waktu, itu kita sampaikan semua laporan kita, posisi keuangan kita seperti apa, kita publikasikan ke website dan dinding laporan keuangan, jadi seluruh orang yang mau tau tentang laporan keuangan kita bisa dengan mudah mengakses di website kita, jadi kita benar – benar transparansi. Dan dengan diterapkannya prinsip transparansi, maka PT. BPR Ambulu Dhanaartha mampu menjalankan prosedur yang ada sesuai POJK dan peraturan BI yang berlaku.”¹⁰²

¹⁰¹ Bapak Arie, Wawancara, Jember, 12 Maret 2020.

¹⁰² Bapak Ika, Wawancara, Jember 12 Maret 2020.

Penjelasan dari hasil wawancara atau interview diatas adalah tentang bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* bank perkreditan rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yang sudah sesuai dengan acuan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015, yang mencakup prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* serta di dalamnya juga dijelaskan bahwa ada lima prinsip yaitu adanya keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accounbility*), pertanggung jawaban (*responbility*), independensi (*indepedency*), dan kewajaran (*fairness*).

Prinsip keterbukaan (*transparency*) adalah perusahaan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan, antara lain laporan keuangan interim, laporan keuangan tengah tahun, dan laporan insidentil, yang diantara lain dengan aksi koporasi, transaksi, afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik. Prinsip akuntabilitas (*accounbility*) adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* agar peneglolaan perusahaan dilakukan secara benar, struktur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengensampingkan kepentingan perusahaan, untuk menjaga akuntabilitasnya perusahaan juga memastikan bahwa semua bagian dalam perusahaan dan karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan seminar, baik didalam maupun diluar perusahaan, untuk pengembangan kompetensinya. Pertanggungjawaban (*responbility*) adalah sepenuhnya perusahaan

menyadari bahwa eksistensi bisnis perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa perusahaan, namun juga masyarakat yang ada disekitar tempat kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pejuang jasa perseroan, namun juga masyarakat yang ada disekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat perusahaan bagi masyarakat di sekitar tempat kegiatan usaha perusahaan tidak hanya berupa penyediaan lapangan pekerjaan, namun juga dengan berbagai program tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*). Independensi (*independency*) adalah perusahaan yang senantiasa memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan. Kewajaran (*fairness*) adalah prinsip yang diterapkan oleh perusahaan untuk setiap pihak yang berkepentingan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing – masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal, dan *stakeholders* kepada perusahaan.

Dengan adanya penerapan kelima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut di PT. BPR Ambulu Dhanaartha, maka bisa

dikatakan bank tersebut mampu menentukan tujuan strategi dan nilai – nilai perusahaan. Sangatlah penting bagi bank untuk menentukan tujuan strateginya secara jelas dan menentukan “etos” perusahaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada seluruh pihak di bank. Penentuan nilai – nilai perusahaan ini harus diaplikasikan pada semua pihak bank, tidak terkecuali dewan direktur. Mereka harus mendorong adanya pelaporan masalah secara berkala dan melarang korupsi dan penyuapan baik secara internal maupun eksternal. Nilai – nilai ini harus didukung dengan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya hal – hal yang dapat menghambat pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), serta adanya penerapan peranan lini tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas, agar lebih efektif dalam memantau dan mengawasi aktivitas bank dan aktivitas bisnis perusahaan tersebut, harus mempunyai lini akuntabilitas yang jelas dan tegas untuk memastikan bahwa semua permasalahan akan mendapatkan respon yang terfokus dari manajemen.

Maka, penerapan *Good Corporate Governance* sangatlah penting dilakukan dan harus menerapkan prinsip – prinsip GCG yang telah ditetapkan dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Tata Kelola bagi BPR yang menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan atau organisasi, dan juga menentukan kelayakan bank itu sendiri sudah termasuk bank yang sehat atau tidak, GCG juga sebagai

pertanggung jawaban bank kepada masyarakat, apakah bank tersebut sehat atau tidak sehat.

2. **Kendala *Good Corporate Governance* (GCG) yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha**

Secara tidak langsung dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pastinya memiliki kendala dalam salah satu prinsipnya yang telah diterapkan di lembaga keuangan. Dan secara tidak langsung lembaga keuangan tersebut memang diwajibkan mengetahui apa saja yang menjadi kendala *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada, tidak halnya dengan Bank umum, namun juga untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Hal ini disampaikan oleh Ibu Ika selaku Pejabat Eksekutif bagian Operasional, beliau menyampaikan bahwa :

“Pada dasarnya semua prinsip yang ada di *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha ini sudah diterapkan semuanya, namun masih ada satu prinsip yang masih pekerjaannya belum maksimal yaitu prinsip Independensi. Mengapa dengan prinsip Independensi, karena dalam setiap keputusan ataupun kebijakan yang di ambil pihak atau pejabat yang ada di kantor pusat Jember, juga harus sesuai dengan persetujuan kantor pusat yang ada di Malang. Terkadang apa yang menurut kantor pusat Jember membutuhkan kebijakan itu, namun oleh kantor pusat yang ada di Malang tidak setuju. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka kantor pusat Jember dengan kantor pusat di Malang mengambil keputusan yang sekiranya tidak membebani kedua belah pihak dan dapat pula diterima oleh kantor pusat yang ada di Malang.”¹⁰³

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Arie selaku Pejabat Eksekutif bagian Kredit, beliau menyampaikan bahwa :

¹⁰³ Ibu Ika, Wawancara, Jember, 12 Maret 2020.

“Diantara 5 prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada di POJK No. 4/POJK/.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran. Dari lima prinsip GCG yang ada di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yang penerapannya kurang maksimal adalah prinsip Kewajaran. Mengapa dengan prinsip Kewajaran, karena tidak adanya keterbukaan serta keterlibatan secara langsung antara audit dalam kredit macet atau bermasalah yang terjadi saat pembayaran angsuran. Jika ada hal yang terjadi seperti itu hanya berhenti pada *account officer* serta TKB (Tim Kredit Bermasalah) dan tidak ada kelanjutan untuk diserahkan kepihak audit.”¹⁰⁴

Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Antok selaku Pejabat Eksekutif bagian Audit yang saya temui ruang meja kantornya, beliau menyampaikan :

“Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dibagi menjadi lima ya memang semuanya dipenuhi dan ditaati oleh PT. BPR Ambulu Dhanaartha, namun pastinya salah diantara kelima prinsip tersebut ada penerapannya kurang optimal yaitu, prinsip Idependensi (*independency*) karena adanya kebenturan kepentingan serta keikut campuran antar orang dalam atau kepentingan orang dalam mengenai *vendor holding* mengenai suatu sistem IT di PT. BPR Ambulu Dhanaarta. Untuk mengatasi permasalahan ini maka, semuanya kembali lagi kepada pemilik saham untuk dilepaskan kepada pihak ketiga, karena disana akan terjadi pertandatanganan kontrak, syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.”¹⁰⁵

Setiap pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang di implementasikan kepada lembaga keuangan pastinya memiliki hambatan, sama halnya dengan POJK No.04/POJK.03/2015 yang mengatur tentang Penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

¹⁰⁴ Bapak Arie, Wawancara, Jember, 12 Maret 2020.

¹⁰⁵ Bapak Antok, Wawancara, Jember 2 Maret 2020.

Sebenarnya kecil kemungkinan kendala yang terjadi pada *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat itu, karena terwujudnya seperangkat hubungan antara dewan komisaris, dewan direksi, atau *board of executive directors*, *stakeholders* dan pemegang saham suatu perusahaan dalam menciptakan tujuan, menjalankan operasi harian, mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank dengan beroperasi secara sehat dan baik, menyesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku, serta memproteksi kepentingan nasabah kreditur yang ada.

Solusi yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan kendala dalam penerapan *Good Corporate Governance* adalah dengan melakukan perundingan untuk mencapai kesepakatan antara dewan komisaris, dewan direksi, atau *board of executive directors*, *stakeholders* dan pemegang saham dalam mengambil keputusan bersama sehingga mencapai suatu keputusan bersama.

C. Pembahasan dan Temuan

Dari beberapa data yang disajikan dan dilakukan analisis, maka hasil tersebut perlu diadakan pembahasan terhadap hasil temuan dalam bentuk interpretasi dan diskusi dengan teori – teori yang ada dan relevan dengan topik penelitian ini. Untuk pembahasan ini akan disesuaikan dengan fokus dan sub fokus penelitian yang terdapat dalam skripsi ini guna mempermudah dalam menjawab pertanyaan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian. Adapun perincian pembahasan ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian implementasi adalah pelaksanaan, penerapan, pertemuan. Sedangkan secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada didalam kamus besar bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan. Browe dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan”. Adapun Schubert mengemukakan bahwa “implementasi adalah sistem rekayasa.”¹⁰⁶

Pelaksanaan Tata Kelola (GCG atau Good Corporate Governance) bagi Bank Umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa Bank Umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya, termasuk pada saat langkah – langkah penawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.¹⁰⁷

Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas

¹⁰⁶ Arinda Firdiantii, M.Pdi, “Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah”, Ebook, ed. Elin Wiji Astuti, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing), 19

¹⁰⁷ Peraturan Bank Indonesia nomo 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, 4 (13 November 2019, jam 10.18)

(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).¹⁰⁸

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang penerapan Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka Bank Perkreditan Rakyat juga diwajibkan menetapkan tata kelola yang baik (GCG), yang mencakup menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*akuntability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selanjutnya sehubungan dengan kewajiban tersebut, maka Bank Perkreditan Rakyat diwajibkan untuk menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip – prinsip GCG.¹⁰⁹

Tata kelola (*Good Corporate Governance*) adalah sistem yang dipergunakan dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. *Corporate Governance* ini juga mengandung pengertian mengenai peraturan atas pembagian tugas dan tanggungjawab diantara pihak atau para “*key players*” yang berpartisipasi dan memiliki kepentingan yang berbeda – beda dalam perusahaan. Para pihak yang berkepentingan atas pengarahannya dan pengendalian perusahaan itu meliputi : dewan direksi, para manager, para pemegang saham, dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya. Oleh karena itu, tata kelola (*Corporate Governance*) juga dapat di definisikan sebagai perangkat hubungan antara

¹⁰⁸ Ibid, 4

¹⁰⁹ Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (22 Oktober 2019, jam 05.55)

dewan komisaris, dewan direksi, atau *board of executive director*, *stakeholders* dan pemegang saham suatu perusahaan.¹¹⁰ GGC dapat menciptakan struktur yang membantu bank dalam :

- a. Menciptakan tujuan.
- b. Menjalankan operasi harian.
- c. Mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan (*stakeholders*) bank dengan beroperasi secara sehat dan baik.
- d. Menyesuaikan dengan hukum dan aturan yang berlaku.
- e. Memproteksi kepentingan nasabah kreditur.¹¹¹

Dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan telah menganut pedoman umum tata kelola perusahaan yang baik yang ditetapkan oleh komite nasional kebijakan governance (KNKG) dengan penerapan tarif, sebagai lima pilar dasar dari GCG yaitu : keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), kewajaran (*fairness*).¹¹²

- a. Keterbukaan (*transparency*)

Perusahaan senantiasa menyampaikan berbagai laporan rutin yang diwajibkan bagi perusahaan, antara lain laporan keuangan intern, laporan keuangan tengah tahun, dan laporan keuangan yang diaudit, laporan tahunan dan laporan insidental, yang antara lain dengan aksi korporasi, transaksi, afiliasi, maupun transaksi material, seluruhnya

¹¹⁰ Drs. H. Masyhud Ali, M.B.A.,M.M Manajemen Risiko “Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis” (Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada, 2006) 334

¹¹¹ Ferry N. Idroes Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan (Yogyakarta;Ghara Ilmu,2006), 169

¹¹² Rusdiyanto,SE.,M.Ak, Good Corporate Governance, (Bandung; PT.Refika Aditama, 2019) 106-107

baik dalam paparan publik maupun melalui media cetak maupun media elektronik.¹¹³

b. Akuntabilitas (*accountability*)

Penerapan pilar akuntabilitas oleh perusahaan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada stakeholders agar pengelolaan perusahaan dilakukan secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan tanpa mengensampingkan kepentingan perusahaan, untuk menjaga akuntabilitasnya perusahaan juga memastikan bahwa semua bagian dalam perusahaan dan karyawan memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam kegiatan usahanya perusahaan. Setiap karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam program pelatihan seminar, baik didalam maupun diluar perusahaan, untuk pengembangan kompetensinya.¹¹⁴

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

Perusahaan sepenuhnya menyadari bahwa eksistensi bisnis perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna jasa perusahaan, namun juga masyarakat yang ada disekitar tempat kegiatan usaha perusahaan. Perusahaan senantiasa berupaya agar eksistensi bisnisnya tidak hanya memberikan manfaat kepada para pejuang jasa perseroan, namun juga masyarakat yang ada disekitar tempat kegiatan usahanya. Manfaat perusahaan bagi masyarakat

¹¹³ Ibid, 107

¹¹⁴ Ibid, 107

sekitar tempat kegiatan usaha perusahaan tidak hanya berupa penyediaan lapangan pekerjaan, namun juga dengan berbagai program tanggungjawab sosial (*Corporate Social Responsibility*).¹¹⁵

d. Independensi (*independency*)

Perusahaan senantiasa memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara independen, tidak saling mendominasi, tidak berpengaruh oleh kepentingan tertentu, serta bebas dari benturan kepentingan. Dengan demikian pengambilan keputusan akan senantiasa objektif dan diharapkan dapat memberikan output yang optimal bagi kepentingan.¹¹⁶

e. Kewajaran (*fairness*)

Prinsip kesetaraan atau kewajaran diterapkan oleh perusahaan untuk setiap pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan senantiasa memberikan kesempatan yang wajar kepada setiap pihak untuk dapat mengakses informasi perusahaan sesuai dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dalam lingkup kedudukan masing – masing, sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh otoritas pasar modal, komunitas pasar modal dan *stakeholders* kepada perusahaan.¹¹⁷

Sangatlah penting bagi bank untuk menentukan tujuan strateginya secara jelas dan untuk menentukan “etos” perusahaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah mengkomunikasikan kebijakan tersebut kepada

¹¹⁵ Rusdiyanto, SE., M. Ak, Good Corporate Governance, (Bandung; PT. Refika Aditama, 2019) 108

¹¹⁶ Ibid, 108

¹¹⁷ Ibid, 108

seluruh pihak di bank. Bank yang tidak memiliki tujuan strategi akan mengalami kesulitan dalam mengatur aktivitasnya karena kurang fokus dalam penggunaan sumber dayanya. Dengan menetapkan etos kerja perusahaan, bank akan dapat menjalankan bisnisnya dengan nilai – nilai yang jelas. Penentuan nilai – nilai perusahaan ini harus diaplikasikan pada semua pihak dan nilai – nilai ini harus didukung dengan kebijakan yang dapat mencegah terjadinya hal – hal yang dapat menghambat pelaksanaan GCG.¹¹⁸

Selain dengan adanya tujuan strategi secara jelas dan nilai – nilai perusahaan maka harus diimbangi dengan lini tanggungjawab dan akuntabilitas yang jelas, mengapa demikian karena agar efektif dalam memantau dan mengawasi aktivitas bank, maka dewan direksi harus menetapkan lini otoritas dan tanggung jawab dengan jelas. Proses ini juga harus meliputi para direksi sendiri.¹¹⁹

Good Corporate Governance (GCG) adalah sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip – prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember merupakan kegiatan usaha dalam bentuk pelayanan lembaga keuangan yang telah menerapkan semua prinsip *Good Corporate Governance* yang di tertera pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan tata

¹¹⁸ Ferry N.Indroess Sugiarto, Manajemen Risiko Perbankan (Yogyakarta;Graha Ilmu, 2006) 171

¹¹⁹ Ibid, 172

kelola (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat, karena dengan berpedoman pada prinsip GCG tersebut maka PT. BPR Ambulu Dhanaartha dapat dikatakan bahwa Bank tersebut sehat.

Di PT. BPR Ambulu Dhanartha kab. Jember sudah mampu menerapkan kelima prinsip GCG yang tertera pada Peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015. Prinsip – prinsip tersebut adalah transparansi (*transparancy*), akuntabilitas (*accounbility*), pertanggungjawaban (*responbility*), independensi (*independecy*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip tersebut sangat penting untuk kelayakan bank itu sendiri, dengan adanya GCG tersebut maka dapat menentukan apakah bank tersebut sehat ataupun tidak. GCG itu merupakan pertanggungjawaban kita sebagai bank kepada masyarakat bahwa bank tersebut dikelola dengan baik dan sehat. Dengan adanya GCG itu juga sejalan dengan tujuan diterapkannya tata kelola di PT. BPR Ambulu Dhanaartha yaitu untuk meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip – prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati – hatian dalam pengelolaan PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha, maka masyarakat tidak was – was ataupun takut kepada lembaga keuangan tersebut untuk melakukan transaksi keuangan, baik dalam bentuk simpanan ataupun melakukan kredit. Dengan adanya penerapan *Good Corporate Governance* maka PT. BPR Ambulu Dhanaartha sudah mampu menerapkan kelima

prinsip – prinsip sesuai yang ada di Peraturan OJK tentang penerapan tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam menerapkan GCG sangatlah penting bagi setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, prinsip – prinsip yang diperlukan adalah menciptakan keterbukaan (*transparency*) yang dikomunikasikan kepada stakeholders guna memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut. Terkait transparansi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember menyampaikan semua laporan keuangan serta informasi tentang kebijakan yang berhak di ketahui oleh *stakeholders* pada setiap setahun sekali secara tepat waktu, posisi keuangan kita seperti apa dan kebijakannya bagaimana kita wajib publikasikan ke website resmi OJK, website resmi milik PT. BPR Ambulu Dhanaartha serta ke dinding laporan keuangan yang ada. Maka semua orang yang mau tau tentang laporan keuangan dan kebijakan kita yang baru tentang PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember dengan mudah mengakses website kita. Selain itu ada prinsip keterbukaan (*transparency*) ada prinsip akuntabilitas (*accountability*), disini PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada masing – masing organ anggota dewan komisaris dan direksi serta seluruh jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai – nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), PT. BPR Ambulu Dhanaartha sangat berpegang pada prinsip kehati – hatian (*prudential banking principles*) dan

menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Prinsip independensi (*independency*), diterapkan untuk menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar di PT. BPR Ambulu Dhanaartha oleh *stakeholders* manapun dan agar tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Serta yang terakhir, yaitu prinsip kewajaran (*fairness*), disini PT. BPR Ambulu Dhanaartha sangat memperhatikan betul – betul bagaimana kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran yang sesuai dengan aturan yang telah disepakati.

PT. BPR Ambulu Dhanaartha dengan ini berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola (*Good Corporate Governance*) sesuai dengan standart tata kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Ambulu Dhanaartha dapat meningkatkan performa Tata Kelola perusahaan yang baik dan memiliki daya saing yang tinggi dengan perbankan lainnya.

2. Kendala penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember

Setiap dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pastinya memiliki kendala dalam salah satu prinsipnya yang telah diterapkan di lembaga keuangan. Dan secara tidak langsung lembaga keuangan tersebut memang diwajibkan mengetahui apa saja yang menjadi kendala *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada, tidak halnya dengan Bank umum, namun juga untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Ketika ada dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT.BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember terjadi kendala, maka bank tersebut wajib untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab kendala penerapan prinsip – prinsip yang ada di PT. BPR Ambulu Dhanaartha. Ada beberapa kendala yang masih terjadi dalam penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* yaitu, prinsip independensi (*independency*) dan prinsip kewajaran (*fairness*). Prinsip idependensi (*independency*) menjadi kendala karena dalam setiap keputusan kebijakan yang diambil oleh pihak atau pejabat yang berwenang yang ada di kantor pusat Jember belum tentu disetujui dengan kantor pusat yang ada di Malang. Menurut kantor pusat Jember keputusan itu memang baik dan sangat dibutuhkan untuk di kantor pusat Jember, namun kurang pas di terapkan di kantor pusat Malang, oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut maka kantor pusat Jember dengan kantor pusat yang di Malang mengambil keputusan ditengah – tengah yang tidak merugikan antara kedua kantor pusat tersebut, yang sama – sama diterima oleh kedua belah pihak dan mampu untuk diterapkan di kantor pusat keduanya. Dan adanya kebenturan kepentingan antara orang dalam dengan satunya dalam menangani *vendor holding* mengenai sistem IT di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.

Selain yang menjadi kendala prinsip independensi (*independency*) yang menjadi kendala di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember, prinsip kewajaran (*fairness*) juga menjadi kendala dalam penerapan *Good*

Corporate Governance (GCG) yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember. Prinsip kewajaran (*fairness*) menjadi kendala karena tidak adanya keterbukaan serta keterlibatan secara langsung antara komite audit dalam penanganan kredit macet saat pembayaran angsuran yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember, jika terjadi kredit macet hanya berhenti pemrosesan di bagian *Account Officer* (AO) dan tim kredit bermasalah (TKB) dan tidak lanjutkan kepada tim audit.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dan kendala penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Perkreditan Rakyat di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang terbagi menjadi lima seperti, keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accounbility*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*) tersebut sudah terlaksana dengan baik dan terpenuhi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember
2. Kendala dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember yaitu adanya pengambilan keputusan antara kantor pusat yang ada di Kota Malang dengan yang berada di Kota Jember yang tidak sinkron atau tidak sama, karena perbedaan tempat dan kasus yang terjadi. Dan adanya kebuturan kepentingan antara orang dalam dengan satunya dalam menangani *vendor holding* mengenai sistem IT di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember. Serta adanya ketidak terbukaan atau keterlibatan secara langsung antara audit dalam kasus kredit macet dengan *Account Officer* (AO) dan Tim

Kredit Bermasalah (TKB) yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember saat pembayaran angsuran.

Dengan adanya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember dapat terlihat jelas bahwa bank tersebut sehat dan mampu mempertanggung jawabkan bahwa bank tersebut di kelola dengan baik dan sehat sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Bank Umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat.

B. Saran

Sebagai hasil akhir dari penyusunan skripsi ini, maka perlu kiranya peneliti menyampaikan beberapa saran yang bisa dijadikan sebuah masukan antara lain :

1. Dengan adanya komunikasi timbal balik antara kantor pusat yang ada di Kabupaten Jember dengan kantor pusat yang ada dikota Malang yang efektif, maka dapat meminimalisir ketidaksinkronan kepentingan dan ketidakterlibatan di dalam kinerja PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Dyahnita. 2015. *Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Artha Berkah Cermelang*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Apriyaningsih, Astri. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011 – 2014*. Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bhakti, Dwi, Kusuma. 2017. *Penerapan Good Corporate (GCG) PT. Bank Syariah Mandiri Kc. Situbondo*. Jember: IAIN Jember.
- Cresswell, John.W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset Memilih lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Data OJK tentang Daftar Anggota BPR di Jember Perjuni 2019* (diakses 1 November 2019 pukul 17.08 wib)
- Eva, Amelinda. 2018. *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada BPR Ram Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Firdianti, Arinda. 2015. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*. Yogyakarta. CV. Gre Publishing Ebook.
- Jannah, Sitti Fitriatul. 2016. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap pencegahan Fraund di Bank Perkreditan Rakyat (Studi BPR di Surabaya)*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Machud, Amir dan Rukman. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Mashud,dkk. 2006. *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lex, J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pati Lima, Hamid. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta.

- Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006. *Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum.* (Di akses 13 November 2019, pukul 10.18 wib)
- Peraturan OJK Nomor. 4/POJK.03/2015 *tentang Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat* (Diakses 22 Oktober 2019 pukul 05.55)
- Prasetya, Ryan. 2015. *Analisis Perbandingan dalam Penerapan Good Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Sustainability, Return On Asset (ROA) di Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat antara Bekasi dengan Bogor.* Bandung: Universitas Islam Bandung
- Rudianto. 2019. *Good Corporate Governance.* Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sugiarto, Ferry N Indros. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Susilo, Mukti Bagas. 2018. *Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja keuangan Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 – 2016.* Semarang: Universitas Diponegoro Semarang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3.* Jakarta: Balai Pustaka.
- Topan. 2016. *Pengaruh sistem Pengendalian Intern, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen organisasi terhadap Penerapan Good Corporate Governance (Studi pada BPRS Bangun Drajat Warga (DPW) Yogyakarta).* Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Usman, Rachmadi. 2001. *Aspek – aspek Hukum Perbankan Di Indonesia.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992. *Tentang Perbankan.*
- <http://www.tugasakuntansi.blogspot.co.id/2015/05artikel-baik/gcggood/corporate.html?m=1> (diakses 11 November 2019, pukul 10.45 wib)
- <http://bprdhanarta.co.id/> (diakses 1 November 2019 pukul 19.00)

Matrik

JUDUL PENELITIAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS MASALAH
Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi 2. <i>Good Corporate Governance</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Pertanggung jawaban 4. Independensi 5. Kewajaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Data Informan <ol style="list-style-type: none"> a. Pejabat Eksekutif Bagian Manajemen Risiko dan Kepatuhan. b. Pejabat Eksekutif bagian Operasional. c. Pejabat Eksekutif bagian Audit. d. Pejabat Eksekutif bagian Kredit. e. Kajian Terdahulu f. Dokumentasi g. Kepustakaan h. Internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) 2. Penentuan informan dengan mengajukan teknik purposive. 3. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Wawancara b. Dokumentasi 4. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi <i>Good Corporate Governance</i> perkreditan rakyat di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember? 2. Apa saja kendala implementasi <i>Good Corporate Governance</i> yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaarta Kab. Jember?

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizna Ramadhani Winanda

NIM : E20161029

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Perbankan Syariah

Institut : IAIN Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember”** adalah benar – benar hasil tulisan dan karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 15 Mei 2020
Saya yang menyatakan



Rizna Ramadhani Winanda
NIM. E20161029



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id

Nomor : B- 95 /In.20/7.a/PP.00.9/ 01/2020
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian dan Magang**

Yth. Pimpinan PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember
di-

TEMPAT

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dan magang dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Rizna Ramadhani Winanda
NIM : E20161029
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
No Telpon : 085730478934
Dosen Pembimbing : Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos.,M.Si
NIP : 19750905 200501 2 003
Judul Penelitian : Implementasi *Good Corporate Governance* Bank
Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha
Kab. Jember

Demikian Surat Permohonan izin penelitian dan magang ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Jember, 30 Januari 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Abdul Rokhim



PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AMBULU DHANAARTHA

Perihal : Penelitian Skripsi

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gunawan Riyanto

Jabatan : Direktur

Menerangkan bahwa,

Nama : Rizna Ramadhani Winanda

NIM : E20161029

Mahasiswa : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah benar melaksanakan penelitian pada perusahaan kami sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

“ Implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember “

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jember, 7 Maret 2020

Hormat Kami,







PT. BPR Ambulu Dhanaartha


Gunawan Riyanto, SP

Direktur

Kantor Pusat : Jl. Raya Suyitman No 59 Telp. (0336) 881075, 881172, Fax. (0336) 882800 Ambulu Jember
Kantor Cabang : Jl. Gajah Mada No. 1 |Ruko Kav. 6 Telp. (0331) 714214 Rambipuji Jember
Kantor Kas I : Jl. S. Parman No. 221 Telp. (0331) 339639 Sumpersari Jember
Kantor Kas II : Jl. PB. Sudirman No. 11 Telp (0331) 566400 Sukowono (Dekat Kantor Kec. Sukowono)
Mail : dhanaartha@ymail.com

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

NO	Tanggal	Kegiatan	Paraf
1.	30 Januari 2020	Penyerahan surat izin dan proposal penelitian.	
2.	07 Maret 2020	Pemberian surat izin penelitian dari pihak PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.	
3.	02 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Antok selaku Pejabat Eksekutif bagian Audit.	
4.	05 Maret 2020	Wawancara dengan Ibu Novi selaku Pejabat Eksekutif bagian Kepatuhan dan Manajemen Risiko.	
5.	12 Maret 2020	Wawancara dengan Ibu Ika selaku Pejabat Eksekutif bagian Operasional.	
6.	12 Maret 2020	Wawancara dengan Bapak Arie selaku Pejabat Eksekutif bagian Kredit.	

Jember, 13 Maret 2020

Direktur PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember



Gunawan Riyanto

PEDOMAN PENELITIAN

1. PEDOMAN OBSERVASI

1. Letak Geografis PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.
2. Gambaran dan kondisi umum kantor PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.
3. Pengamatan secara langsung mengenai penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) / Tata Kelola PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.

2. PEDOMAN INTERVIEW / WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi *Good Corporate Governance* Bank Perkreditan Rakyat, di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?
2. Apa saja kendala *Good Corporate Governance* yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?

3. PEDOMAN DOKUMENTER

1. Foto Penelitian.
2. Visi dan Misi PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.
3. Denah lokasi PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.
4. Struktur organisasi PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember.



**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT. BPR AMBULU
DHANAARTHA KAB. JEMBER**

➤ **Informan :**

1. Kabag. Kepatuhan dan Manj. Risiko
2. Kabag Audit
3. Kabag Kredit
4. Kabag Operasional

➤ **Pedoman Interview / wawancara :**

• **Fokus masalah 1 :**

“Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha di Kab. Jember?”

• **Pertanyaannya :**

1. Apa yang anda fahami tentang Good Corporate Governance (GCG)?
2. Bagaimana hasil penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?
3. Apa manfaatnya dari penerapan Good Corporate Governance (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?
4. Prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) apa saja yang telah terapkan / implementasikan di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?
5. Apakah dengan penerapan Good Corporate Governance (GCG) tersebut mampu menghasilkan peningkatan nasabah serta meningkatkan kinerja dari karyawan yang ada di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember? Dan apakah hasilnya sudah maksimal?
6. Di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember apakah semua karyawannya mampu menerapkan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) tersebut? prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) manakah yang sampai saat ini diterapkan dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance (GCG) manakah yang sampai saat ini sulit untuk diterapkan?

**PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PT. BPR AMBULU
DHANAARTHA KAB. JEMBER**

➤ **Informan :**

1. Kabag. Kepatuhan dan Manj. Risiko
2. Kabag Audit
3. Kabag Kredit
4. Kabag Operasional

➤ **Pedoman Interview / wawancara :**

• **Fokus masalah 2 :**

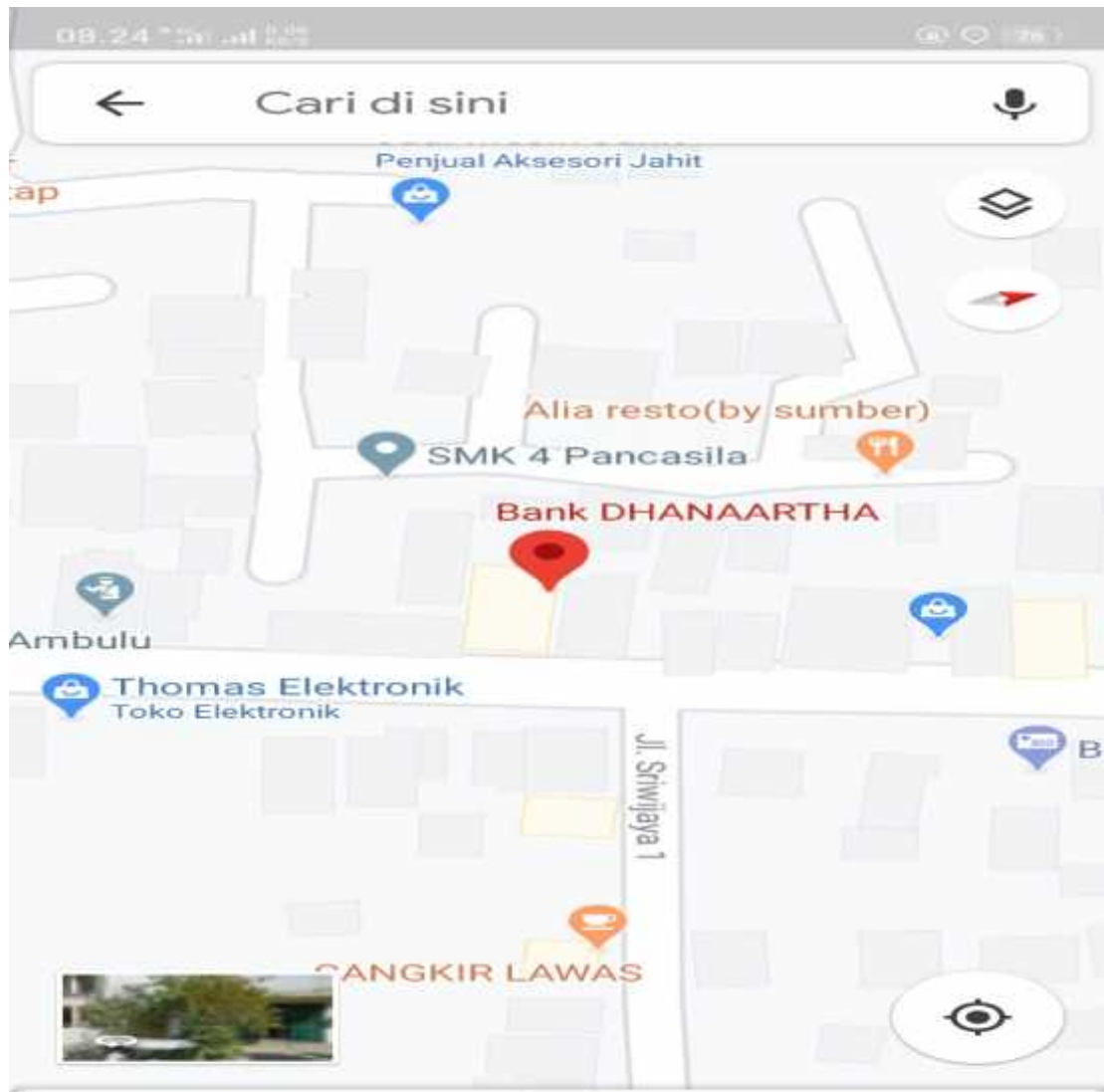
“Apa saja kendala *Good Corporate Governance* (GCG) yang terjadi di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?”

• **Pertanyaannya :**

1. Menurut anda apakah kendala dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?
2. Sampai saat ini apakah masih ada prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember yang menjadi kendala atau sudah tidak ada? Kalau masih ada prinsip yang terkendala penerapannya yaitu prinsip apa?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember?
4. Di antara 5 prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang berupa keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accounbility*), pertanggungjawaban (*responbility*), independensi (*independency*) dan kewajaran (*fairness*), menurut anda prinsip manakah yang penerapannya yang sangat maksimal dan yang kurang maksimal? Dan mengapa prinsip tersebut menjadi tidak maksimal dalam penerapannya?

DOKUMENTASI





Bank DHANAARTHA

Bank

🕒 43 mnt

Buka · Tutup jam 16.00

Peta Denah PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember

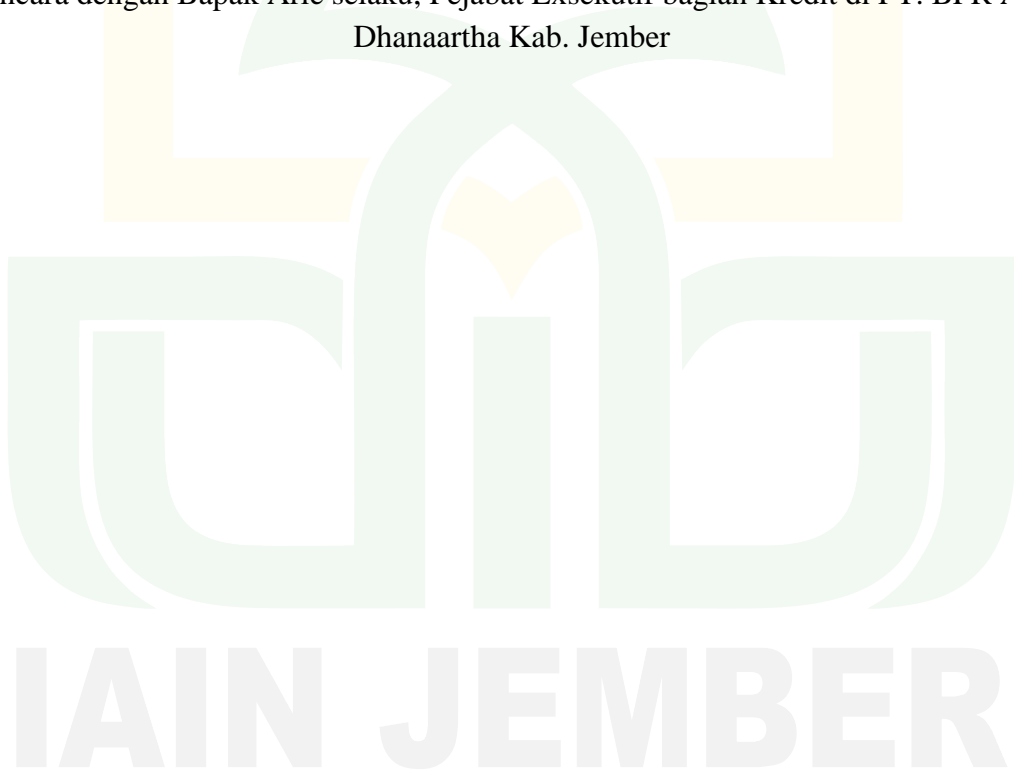
IAIN JEMBER



Wawancara dengan Ibu Novi, selaku Pejabat Exsekutif bagian Manajemen Risiko & Kepatuhan di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember



Wawancara dengan Bapak Arie selaku, Pejabat Exsekutif bagian Kredit di PT. BPR Ambulu Dhanaartha Kab. Jember



BIODATA PENULIS



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Rizna Ramadhani Winanda
2. Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 14 Januari 1998
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Alamat : Jl. Wonorejo Selatan II / Kav 29 RT 05 RW 08
Rungkut - Surabaya
5. Agama : Islam
6. Status : Belum Menikah
7. Pekerjaan : Mahasiswa
8. Kewarganegaraan : WNI
9. No. Hp : 085730478934
10. E-mail : riznawinanda@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Putra Berlian Surabaya (2002-2004)
2. SD : SDN Medokan Ayu II/615
Surabaya (2004 - 2010)
3. SMP : SMP Negeri 30 Surabaya (2010-
2013)
4. SMA : SMA Dr. Soetomo Surabaya (2013-
2016)
5. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri
Jember, Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam, Prodi Perbankan
Syariah (2016-2020)